



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat Taufik dan Hidayah-Nya semata, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dapat diselesaikan dengan baik.

Dan dalam rangka terselenggaranya Prinsip-prinsip Kepemerintahan yang baik (*good governance*), maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban atau akuntabilitas yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sebagaimana amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), maka setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan oleh masing-masing instansi, serta kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur ini didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, di dalamnya memuat unsur-unsur Perencanaan Strategis dan Evaluasi serta analisis pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2013.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 ini juga mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 dan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 ini merupakan perwujudan akuntabilitas Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang berkewajiban mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan tugas sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur melalui pengukuran pencapaian kinerja (rasio capaian) dan dengan indikator sasaran yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009–2014, semoga bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan rencana tindak (*follow up*) baik bagi pencapaian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

Surabaya, 30 Januari 2014

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	6
1.3 TUJUAN.....	11
1.4 GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR.....	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	20
2.1 RENCANA STRATEGIS (Renstra) dan PENETAPAN KINERJA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013.....	20
VISI	23
MISI	24
TUJUAN	25
SASARAN.....	27
INDIKATOR.....	28
PROGRAM.....	29
KEGIATAN.....	30
2.2 PENETAPAN KINERJA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013.....	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013	36
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	38
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	60
3.3.1 Ikhtisar Pencapaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	60
3.3.2 Ikhtisar Realisasi Target Kinerja Belanja Langsung.....	62
BAB IV P E N U T U P	67
4.1 KESIMPULAN.....	67
4.2 PERMASALAHAN DAN KENDALA.....	68
4.3 REKOMENDASI.....	69
LAMPIRAN I	
MATRIKS RENCANA STRATEGIS DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR 2009-2014	
LAMPIRAN II	
PENETAPAN KINERJA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013	
LAMPIRAN III	
PENETAPAN KINERJA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013	
LAMPIRAN IV	
PENGUKURAN KINERJA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013	
LAMPIRAN V	
FOTO-FOTO PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR DI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2013	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Data Personil Berdasarkan Golongan Ruang.....	18
Tabel 1.2	Data Personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	18
Tabel 1.3	Sarana dan Prasarana Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.....	19
Tabel 2.1	Matrik Hubungan antara Misi dan Tujuan.....	26
Tabel 2.2	Matrik Hubungan antara Tujuan dan sasaran.....	28
Tabel 2.3	Penetapan Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013	32
Tabel 2.4	Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.....	34
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Capaian Kinerja Bermakna Progress Positif.....	37
Tabel 3.2	Skala Pengukuran Capaian Kinerja Bermakna Progress Negatif.....	38
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013...	39
Tabel 3.4	Indikator Kinerja, Target dan Realisasi (Sasaran Strategis : Peningkatan PAD).....	50
Tabel 3.5	Indikator Kinerja, Target dan Realisasi serta Rasio Capaian Kinerja (Sasaran Strategis : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik).....	59
Tabel 3.6	Pendapatan Asli Daerah (yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur) Tahun Anggaran 2013 (*sebelum di-audit).....	61
Tabel 3.7	Realisasi Belanja Langsung Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 (*sebelum di-audit).....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.....	15
Gambar 1.2	Struktur Organisasi UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.....	17

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Perbandingan Persentase Target Rencana Strategis dan Realisasi Capaian Kinerja serta Rasio Capaian Kinerja (<i>Performance Gap</i>) Tahun 2010-2013 untuk Indikator Kinerja Utama : Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	41
Grafik 3.2	Perbandingan Persentase Target Rencana Strategis dan Realisasi Capaian Kinerja serta Rasio Capaian Kinerja Tahun 2010-2013 untuk Indikator Kinerja Utama : Persentase Penurunan Piutang/Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	46
Grafik 3.3	Perbandingan Persentase Target Rencana Strategis dan Realisasi Capaian Kinerja serta Rasio Capaian Kinerja (<i>Performance Gap</i>)Tahun 2010-2013 untuk Indikator Kinerja Utama : Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).....	55
Grafik 3.4	Perbandingan Persentase Target Rencana Strategis dan Realisasi Capaian Kinerja serta Rasio Capaian Kinerja (<i>Performance Gap</i>)Tahun 2010-2013 untuk Indikator Kinerja Utama : Jumlah KB. Samsat yang Melaksanakan SMM ISO 9001:2008.....	57
Grafik 3.5	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2013.....	62

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan program kegiatan yang telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009–2014, bertitik tolak pada Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjadi kontributor utama pada pembangunan di Jawa Timur.

Dalam agenda utama Pembangunan Daerah Jawa Timur, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagai pelaksana, melaksanakan program-program yang memacu kinerja instansi dan aparatur dengan berorientasi pada hasil (*result oriented*), sehingga dapat mewujudkan Visi dan Misi bermuara pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Peningkatan Pelayanan Publik yang baik (*excellent service*).

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah PAD (yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pembayaran Pajak Daerah, juga langkah-langkah mempermudah sistem dan prosedur layanan serta banyaknya, baik jumlah maupun jenis layanan Samsat Unggulan yang ditawarkan kepada Wajib Pajak.

Sampai dengan Tahun 2013 Indikator Kinerja Utama terhadap prestasi pencapaian sasaran strategis pertama yaitu; Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur telah mencapai 156,80%. Hal ini dapat dijelaskan dari realisasi Indikator Kinerja Persentase Kenaikan

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 16,92% dibandingkan dengan target tahun berjalan indikator kinerja Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 6,5% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 260,28%. Sedangkan dari realisasi Indikator Kinerja Persentase Penurunan Piutang/Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 49,15% dibandingkan dengan target tahun berjalan indikator kinerja Persentase Penurunan Piutang/Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 30% sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 163,83%.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama terhadap prestasi pencapaian sasaran strategis kedua yaitu; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 telah mencapai 101,50%. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dari realisasi Indikator Kinerja Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai sebesar 87,56 dibandingkan dengan target tahun berjalan indikator kinerja Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai sebesar 85,00. Sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 103,01%. Sedangkan untuk indikator kinerja Jumlah KB Samsat yang melaksanakan SMM ISO 9001:2008, dari target tahun berjalan sebanyak 48 (empat puluh delapan) KB Samsat dapat direalisasikan konstan sebanyak 48 (empat puluh delapan) KB Samsat yang bersertifikasi SMM ISO 9001:2008. Sehingga capaian kinerjanya diperoleh angka sebesar 100,00%.

Dalam rangka mewujudkan target-target yang diharapkan pada tahun 2013 tersebut Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan anggaran belanja langsung sebesar Rp256.801.612.000,00 (dua ratus lima puluh enam milyar delapan

ratus satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah) untuk 6 (enam) program dan dijabarkan dalam 46 (empat puluh enam) kegiatan.

Dan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, maka terhadap pencapaian kinerja kedua Sasaran Strategis yaitu Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik tersebut dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagai wujud pelaporan terkait dengan perencanaan dan penganggaran serta tingkat keberhasilan.

Surabaya, 28 April 2014
KEPALA DINAS PENDAPATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

BOBBY SOEMIARSONO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661031 199011 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Jawa Timur adalah merupakan provinsi di bagian paling timur pulau Jawa, dengan luas wilayah 47.922 Km². Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2012 secara rinci jumlah penduduk di Jawa Timur berjumlah 37.879.713 orang dengan kepadatan penduduk sebanyak 790 jiwa/km². Jawa Timur memiliki wilayah terluas diantara 6 provinsi di Pulau Jawa, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di barat. Wilayah Jawa Timur juga meliputi Pulau Madura, Pulau Bawean, Pulau Kangean serta sejumlah Pulau-Pulau kecil di Laut Jawa dan Samudera Hindia (Pulau Sempu dan Nusa Barung).

Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten/Kota dan 642 Kecamatan serta 8.464 Desa/Kelurahan. Di Provinsi Jawa Timur kegiatan pembangunan secara umum sudah dapat dirasakan di seluruh wilayah, hal ini dapat ditunjukkan melalui semakin menurunnya tingkat disparitas antar wilayah di Jawa Timur.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah berkewajiban mensukseskan pembangunan daerah dan harus mampu mengandalkan

pendapatan daerahnya terutama yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah merupakan sumber pendapatan yang dapat diperoleh dengan memanfaatkan serta mengelola sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri. Penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sepenuhnya tergantung dari kreativitas daerah untuk memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur dilaksanakan melalui rencana kerja dengan uraian sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Upaya peningkatan kualitas pelayanan diarahkan pada tujuan untuk semakin mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan dengan wujud nyatanya adalah percepatan waktu dan pelayanan yang selalu berorientasi kepada kepuasan masyarakat. Pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan melalui penambahan tempat pelayanan yaitu pelayanan *Drive Thru* Roda 2 (dua), *Drive Thru* Roda 4 (empat), pelayanan Samsat Link yang terkoneksi seluruh Jawa Timur, Payment Point, Samsat Corner, dan Samsat Keliling Mandiri. Selain itu, pengembangan teknologi informasi dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bisa melalui pelayanan e-Samsat.

2. Memanfaatkan Sumber Daya dan Mensinergikan Potensi Daerah

Dengan Program dan atau Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, peningkatan hubungan dan atau kerja sama antar Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan dengan Pemerintah Pusat/BUMN dalam rangka peningkatan penerimaan Bagi Hasil dari Pemerintah, pengembangan fasilitasi kerjasama dengan Kabupaten/Kota di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang potensial, profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi. Beberapa kebijakan yang dilakukan adalah melalui diklat, pelatihan etika pelayanan, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang paling dominan memberikan kontribusi terbesar dalam struktur Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi sumber pendapatan daerah berupa Pajak Daerah yang ditekankan pada perbaikan sistem pemungutan, peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk pelaksanaannya telah pula dikeluarkan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur.

Tata Laksana Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar tekad dan semangat untuk perwujudannya Tata Laksana Kepemerintahan yang baik (*good governance*) itu, maka beban tugas dan tanggung jawab Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagai perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dituntut untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan itu, maka diperlukan pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, jelas dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur harus bisa berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna.

Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dalam melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tersebut, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang di dalamnya berisi konstelasi perencanaan strategik dan implementasinya serta tolok ukur keberhasilan berbagai indikator yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi organisasi. Dengan demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 ini merupakan

rangkaian yang tidak terpisahkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun sebelumnya.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Prinsip-prinsip Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Indonesia sebagaimana telah diamanahkan oleh rakyat melalui Tap MPR Nomor IX Tahun 1998.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Mendorong Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur baik dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
2. Terciptanya pelayanan publik yang akuntabel, jelas, mudah dan transparan;
3. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Jawa Timur terhadap penyelenggara pelayanan pada Kantor Bersama Samsat di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur ditetapkan dan mengacu pada peraturan perundangan, sebagai berikut :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah dirubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik di Jawa Timur;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
32. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;
33. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 119 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;

34. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga atas Pembelian Kayu dari Perum Perhutani Unit II Jawa Timur;
35. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;
36. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah.

1.3. TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dalam rangka memberikan tuntutan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dituangkan dalam suatu Sistem AKIP (SAKIP).

Maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah sebagai sarana penyampaian pertanggungjawaban pencapaian kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan Visi dan Misinya, sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

1.4. GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur memiliki cakupan wilayah operasional seluas 47.922 Km² dengan 38 Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan operasional didukung oleh 35 (tiga puluh lima) Unit Pelaksana Teknis dan 48 (empat puluh delapan) Kantor Bersama SAMSAT yang tersebar di Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur.

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagai Instansi pelaksana mempunyai kewajiban untuk mendukung terlaksananya agenda yang ditetapkan yaitu **"MEWUJUDKAN PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI, DAN MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK"**, dengan prioritas pembangunan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik, serta program prioritas/utama yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 17 (tujuh belas) kegiatan-kegiatan prioritas/utama.

Salah satu upaya peningkatan pendapatan daerah yang dipandang cukup efektif adalah dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat maupun perbaikan sistem pemungutan. Dalam konteks peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat inilah, maka penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur selalu berorientasi pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sebagai wujud dalam upayanya memberikan lebih banyak alternatif jenis pelayanan bagi masyarakat, Dinas

Pendapatan Provinsi Jawa Timur selain memiliki KB. SAMSAT yang memiliki standar pelayanan berdasar pada SMM ISO 9001:2008 dan juga telah menambah jenis layanan Samsat Unggulan lainnya seperti Samsat Drive Thru, Samsat Link, Samsat Keliling, Samsat Corner, Payment Point, e-Samsat, Samsat Kepulauan, e-Banking serta memberikan kemudahan informasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan sarana untuk menyampaikan komplain/saran terhadap pelayanan pada Kantor Bersama Samsat di Jawa Timur melalui SMS Info PKB dan SMS Komplain Samsat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pendapatan. Sedangkan dalam melaksanakan tugas Dinas Pendapatan menyelenggarakan fungsi :

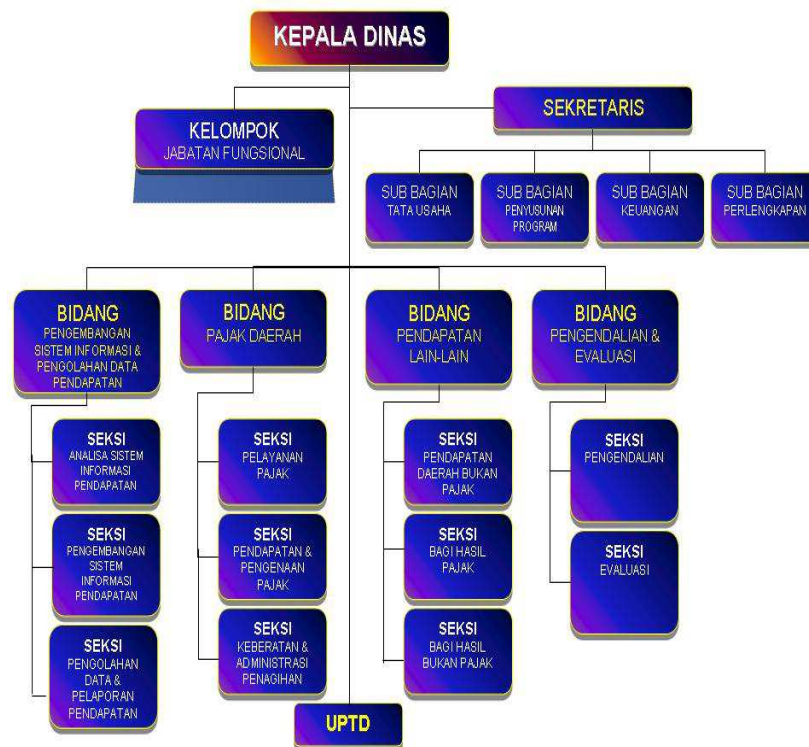
- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pendapatan;
- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Pendapatan;
- Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas; serta,
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, dengan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur (Gambar 1.1) sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program
 - c. Sub Bagian Keuangan
 - d. Sub Bagian Perlengkapan
3. Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Pengolahan Data Pendapatan, membawahi :
 - a. Seksi Analisis Sistem Informasi Pendapatan
 - b. Seksi Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan
 - c. Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan Pendapatan
4. Bidang Pajak Daerah, membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Pajak
 - b. Seksi Pendataan dan Pengenaan Pajak
 - c. Seksi Keberatan dan Administrasi Penagihan
5. Bidang Pendapatan Lain-Lain, membawahi :
 - a. Seksi Pendapatan Daerah Bukan Pajak
 - b. Seksi Bagi Hasil Pajak
 - c. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak
6. Bidang Pengendalian dan Evaluasi, membawahi :
 - a. Seksi Pengendalian
 - b. Seksi Evaluasi
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

8. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1.1 (Struktur Organisasi Dinas)

Struktur Organisasi pada Kantor Dinas disusun berdasarkan fungsi (*by function*), sebab kegiatan pada Kantor Dinas dititikberatkan pada penyusunan kebijakan bidang Pendapatan Daerah. Sedangkan struktur organisasi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) disusun berdasarkan proses (*by process*) dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja kegiatan operasional dan pelayanan pada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan ujung tombak kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan pelayanan pada masyarakat.

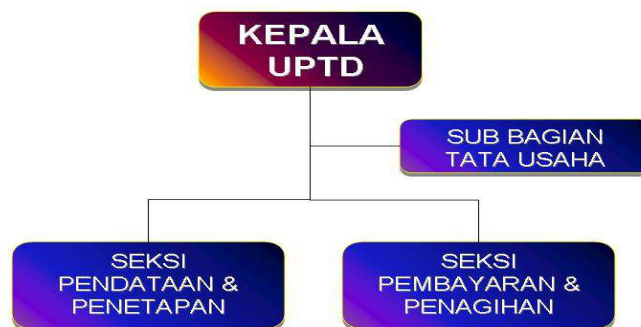
Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas daerah di lapangan, dengan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas dinas daerah sesuai dengan bidang operasionalnya di lapangan;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur (Gambar 1.2), terdiri atas:



Gambar 1.2 (Struktur Organisasi UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur)

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur memiliki 35 (tiga puluh lima)

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di seluruh Jawa Timur.

Data Personil

Data Kepegawaian di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sampai dengan Desember 2013 Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 834 (delapan ratus tiga puluh empat) SDM Aparatur, dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 530 (lima ratus tiga puluh) personil dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Berdasarkan Golongan Ruang :

Tabel 1.1 Data Personil Berdasarkan Golongan Ruang

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	7
3	Pembina (IV/a)	40
4	Penata Tingkat I (III/d)	140
5	Penata (III/c)	68
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	115
7	Penata Muda (III/a)	124
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	30
9	Pengatur (II/c)	20
10	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	169
11	Pengatur Muda (II/a)	73
12	Juru Tingkat I (I/d)	14
13	Juru (I/c)	11
14	Juru Muda Tingkat I (I/b)	17
15	Juru Muda (I/a)	5
JUMLAH		834

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

Tabel 1.2 Data Personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	S – 3 (Doctoral)	0
2	S – 2 (Pasca Sarjana)	81
3	S – 1 (Sarjana)	337
4	D-IV	3
5	D-III	19
6	D-II	0
7	D-I	4
8	SLTA	333
9	SLTP	33
10	SD	24
JUMLAH		834

Sarana dan Prasarana

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2013 memiliki Sarana dan Prasarana penunjang dan merupakan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013

NO	URAIAN	JUMLAH/UNIT	NILAI (Rp)
1.	Tanah	90 Bidang	133.752.370.900,-
2.	Peralatan dan Mesin	54.956 Buah/Set	168.545.071.690,-
3.	Gedung dan Bangunan	262 Buah	75.924.249.422,-
4.	Jalan, Irigasi & Jaringan	155 Buah	4.735.952.400,-

5.	Aset Tetap Lainnya	801 Buah/Set	405.457.111,-
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	1 Buah	10.629.151.669

Keterangan : Data bersifat *tentative* sampai dengan Tanggal 31 Desember Tahun 2013 (Belum dilakukan rekonsiliasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur dan belum di-*audit*)

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS (Renstra) dan PENETAPAN KINERJA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Penyusunan Renstra SKPD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur merupakan perencanaan jangka panjang dan bersifat umum yang

dijabarkan dalam perencanaan satu tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta mampu meningkatkan tuntutan dan harapan masyarakat, maka Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur secara terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja. Langkah awal yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis dan tetap berada dalam tatanan, maka Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur berupaya untuk lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai

dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* (penghargaan) dan *punishment* (sanksi).

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang mempunyai kedudukan dan fungsi strategis dalam sistem perencanaan tahunan. Renja SKPD juga merupakan perencanaan yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka anggaran guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur perlu ditetapkan tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan. Rencana Kerja (Renja) SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah. Selain itu Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja juga menjembatani koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Rencana Kerja (Renja) dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

VISI

Visi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 adalah sebagaimana berikut :

“Terdepan Dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Dibanggakan Dalam Pelayanan Publik”,

Terdepan berarti bahwa Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dicita-citakan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Jawa Timur yang mampu bertindak sebagai *“leader”* dalam mengkoordinasikan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas/Badan/Institusi di Provinsi Jawa Timur dan bertaraf nasional. Dengan demikian pengertian *“Leader”*, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur diharapkan memelopori setiap usaha dan kegiatan dalam penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilakukan di Provinsi Jawa Timur, sekaligus bertindak sebagai koordinator pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan pendataan, penetapan, pembayaran, penagihan, pembukuan

pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan di bidang Pendapatan Daerah.

Dibanggakan dimaksudkan, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam melayani masyarakat pembayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, baik melalui Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (Samsat) dan sistem pembayaran lainnya (*payment system*), ditujukan untuk membangun kepercayaan masyarakat (*public trust*), dalam kepatuhan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan yang sah.

MISI

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan yang merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 sebagaimana berikut :

“Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pelayanan Publik Yang Baik (Excellent Service)“, bahwa pelaksanaan kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur selain fokus pada strategi dalam penggalan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mencari solusi tepat dan memberikan kemudahan dalam hal pelayanan serta menciptakan pelayanan yang *pro-rakyat* tanpa membebani masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sangat mudah dan sangat dimengerti masyarakat dan khususnya Wajib Pajak.

TUJUAN

Tujuan merupakan sesuatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis seperti yang terdapat di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014. Tujuan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan terwujudnya Pelayanan Publik yang baik, dengan azas transparansi, akuntabilitas, kondusional, partisipatif, kesamaan keseimbangan hak dan kewajiban.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, maka perlu dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*). Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh lembaga dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu yang telah ditetapkan. Formulasi tujuan strategis dimaksud, memperhatikan faktor internal dan eksternal untuk mengukur sejauh mana visi, misi dalam mencapai tujuan strategisnya, dan setiap tujuan strategis yang ditetapkan diperlukan indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Rumusan Tujuan Strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD),
2. Terwujudnya Pelayanan Publik yang baik dengan azas transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, keseimbangan kesamaan hak dan kewajiban.

Secara lebih terinci tujuan tersebut adalah untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan berbagai cara yang dimiliki dan kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan guna mendukung pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta mewujudkan sebuah pelayanan yang baik dengan berdasarkan pada azas transparan, yaitu semua biaya secara transparan dan tanpa ada biaya pemungutan lainnya, dengan rincian yang detail dan jelas, serta kondisional yaitu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat/Wajib Pajak dan memberikan pelayanan yang sama dengan tidak membeda-bedakan dalam pemberian pelayanan kepada Wajib Pajak.

Tabel : 2.1 Matriks Hubungan antara Misi dan Tujuan

MISI	TUJUAN	
Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pelayanan Publik yang Baik (<i>Excellent Service</i>)	I	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	II	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Baik, dengan azas transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, keseimbangan kesamaan hak dan kewajiban

SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (Tahun 2009-2014), dapat dirumuskan berdasarkan tujuan (seperti yang tersebut di atas), yaitu :

Tujuan-1 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sasaran Strategisnya adalah **Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)** dengan Indikator Sasarannya adalah :

- a. Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Persentase Penurunan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Tujuan-2 : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Baik, dengan azas transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, keseimbangan kesamaan hak dan kewajiban. Sasaran Strategisnya adalah **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik** dengan Indikator Sasarannya adalah :

- a. Rata-rata nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM);
- b. Jumlah KB. Samsat yang Melaksanakan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008.

Tabel : 2.2 **Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran**

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS			
Uraian		Uraian		Indikator	
I	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	I	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
				2. Persentase Penurunan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	
II	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Baik, dengan azas transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, keseimbangan kesamaan hak dan kewajiban	II	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
				2. Jumlah KB Samsat yang Melaksanakan SMM ISO 9001:2008	

INDIKATOR

Untuk dapat merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan di atas, maka pencapaian tujuan dan sasaran dijabarkan ke dalam pencapaian indikator-indikator melalui Program-Program dan Kegiatan-Kegiatan yang mendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran dimaksud. Beberapa Indikator yang dimaksud, antara lain :

- a. Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Persentase Penurunan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- c. Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- d. Jumlah KB. Samsat yang Melaksanakan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008.

PROGRAM

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dan dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Program yang telah ditetapkan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tahun 2013 sebanyak 6 (enam) Program yang dijabarkan dalam 46 (empat puluh enam) Kegiatan, dengan Program prioritas/utamanya yaitu **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**. Berikut adalah ke-6 (enam) Program-program Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah.

KEGIATAN

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan instansi dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi konkrit /nyata organisasi untuk dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dengan kebijakan-kebijakan organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut. Terdapat 17 (tujuh belas) kegiatan-kegiatan prioritas/utama di dalam program prioritas/utama; **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah** yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2013 sebagai berikut yaitu :

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah;
2. Peningkatan Pendapatan Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
3. Peningkatan Kinerja Operasional;
4. Kerjasama Pengembangan Pendapatan Daerah dengan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat terkait;
5. Kerjasama dengan sektor publik/BUMN dan pengembangan sharing pendapatan (*profit/revenue sharing*) dan manajemen pelayanan publik (*benchmarking*);
6. Retribusi Tempat Pelelangan;
7. Peningkatan Pengembangan Kelembagaan;

8. Peningkatan Pelayanan Publik;
9. Peningkatan Kinerja Pelayanan;
10. Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Daerah;
11. Pengembangan Pusat Pengolahan Data;
12. Analisis dan Evaluasi Kinerja;
13. Pengembangan dan Perbaikan Sarana/Prasarana Kelembagaan;
14. Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah;
15. Pengolahan Data Pendapatan Daerah;
16. Peningkatan Kompetensi Pranata Komputer KB. Samsat dan UPTD;
17. Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi di KB. Samsat dan UPTD.

2.2 PENETAPAN KINERJA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2013 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014.

Oleh karena itu Indikator-indikator Kinerja dan Target Tahunan yang digunakan dalam Penetapan Kinerja adalah Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014.

Capaian Kinerja Tahun 2013 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2013 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur. Analisis atas Capaian Kinerja terhadap rencana Target Kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (*Feedback*) perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur secara berkelanjutan.

Penetapan Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dijadikan acuan untuk mengukur seberapa jauh pencapaian Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dan melaporkannya ke dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) seperti pada Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3 Penetapan Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6,5%	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	51.764.034.925,00
		2	Persentase Penurunan Piutang/Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	30%		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
2.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00		
		2	Jumlah KB Samsat yang Melaksanakan SMM ISO 9001:2008	48		

Berdasarkan Tabel 2.3 dapat dijelaskan bahwa tujuan/sasaran untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diukur dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Tahun Dasar dan Persentase Penurunan Piutang/Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari saldo awal tunggakan tahun berjalan dengan penetapan target pencapaian masing-masing sebesar 6,5% dan 30%. Untuk sasaran peningkatan Kualitas Pelayanan Publik diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target capaian sebesar 85,00 dan Jumlah KB Samsat yang melaksanakan SMM ISO 9001:2008 sebanyak 48 (empat puluh delapan) KB Samsat.

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur mempunyai 2 (dua) Sasaran Strategis yang didukung dengan program prioritas/utama yaitu **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah** yang

diimplementasikan pada 17 (tujuh belas) kegiatan-kegiatan utama guna mendukung tercapainya sasaran strategis dimaksud. Kegiatan-kegiatan tersebut dibiayai dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp 51.764.034.925,00 (lima puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).

Setelah dilakukan Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2013, maka Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur membuat Rencana Kinerja Tahunan dengan merumuskan target pencapaian, Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dapat dilihat seperti pada Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6,5%
		2.	Persentase Penurunan Piutang/Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	30%
2.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00
		2	Jumlah KB Samsat yang Melaksanakan SMM ISO 9001:2008	48

Berdasar pada tabel 2.4 tersebut, dapat dijelaskan bahwa Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur mempunyai 2 (dua) sasaran strategis yang merupakan tujuan utama dengan masing-masing memiliki target capaian, yaitu untuk indikator Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun sebelumnya sebesar 6,5%, persentase Penurunan Piutang/Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan target capaian sebesar 30% per tahun, dan Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target capaian 85,00 serta Jumlah KB. Samsat yang melaksanakan SMM ISO 9001:2008 dengan target capaian sebanyak 48 (empat puluh delapan) Kantor Bersama Samsat.

Untuk mencapai target tersebut, maka Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur harus mampu mengoptimalkan kegiatan-kegiatan utama yang telah direncanakan dan disusun pada Tahun 2013 ini dengan berbagai macam inovasi dan terobosan-terobosan baru yang mendukung serta melaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung baik dari sisi infrastruktur maupun sisi koordinasi yang mendukung tercapainya tujuan dari kegiatan utama.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari pelaksanaan program itu sendiri sebagai fungsi *Actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan program yang mengarahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan program sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui

selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis, maka dapat dipergunakan skala penilaian pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut. Terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran yaitu :

- a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Capaian Kinerja Bermakna Progress Positif

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	75 % sampai 100 %	Baik
2	55 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

- b. Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 3.2

Skala Pengukuran Capaian Kinerja Bermakna Progress Negatif

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Kurang
2	75 % sampai 100 %	Cukup
3	55 % sampai 75 %	Baik
4	Kurang dari 55 %	Sangat Baik

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Penetapan Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 memuat informasi tentang Sasaran-sasaran Strategis yang akan dicapai pada tahun 2013, Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi, Target atau Rencana Capaian Kinerjanya, Program, serta uraian Kegiatan.

Berdasarkan beberapa Tujuan yang telah ditetapkan, maka Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur merumuskan Sasaran Strategis yang ingin dicapai atau diharapkan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu antara lain :

- 1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),**
- 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.**

Program Prioritas dari program-program pembangunan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, yaitu; **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah** dan terdapat 17 (tujuh belas) kegiatan-kegiatan prioritas/utama di dalam program prioritas/utama tersebut.

Pengukuran kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil Pengukuran Kinerja setiap Sasaran Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% (5/4)
1	2	3		4	5	6
1	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	Persentase Kenaikan Penerimaan PAD	6,5%	16,92%	260,31%
		2	Persentase Penurunan Piutang PKB	30%	49,15%	163,83%
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1	Rata-Rata Nilai IKM	85,00	88,29	103,87%
		2	Jumlah KB Samsat yang melaksanakan SMM ISO 9001:2008	48	48	100,00%
Rata-Rata Persentase Capaian Kinerja (kedua Sasaran Strategis)						156,80%

Dari Tabel 3.3 (dan berdasarkan Skala Pengukuran Capaian Kinerja Bermakna Progress Positif) dapat disimpulkan bahwa : Capaian Kinerja Tahun 2013 dalam rangka mencapai :

1. **Sasaran Strategis Pertama** yaitu “**Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**” dengan :
 - a. **Indikator Kinerja Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)** dapat dikategorikan **Sangat Baik** (dengan persentase Capaian Kinerja sebesar **260,31%**),
 - b. **Indikator Kinerja Persentase Penurunan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)** bisa dikategorikan **Sangat Baik** (dengan persentase Capaian Kinerja sebesar **163,83%**).

2. **Sasaran Strategis Kedua** yaitu “**Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**” dengan :

a. **Indikator Kinerja Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** pada pelayanan KB Samsat tergolong **Sangat Baik** (dengan persentase Capaian Kinerja sebesar **103,87%**),

b. **Indikator Kinerja Jumlah KB. Samsat yang Melaksanakan SMM ISO 9001:2008** tergolong **Baik** (dengan persentase Capaian Kinerja sebesar **100%**).

Secara keseluruhan rata-rata persentase Capaian Kinerja dari kedua Sasaran Strategis di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2013 tergolong **Sangat Baik** dengan Capaian Kinerja sebesar **156,80%**. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran terhadap 2 (dua) Sasaran Strategisnya tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan melebihi Target yang telah ditetapkan.

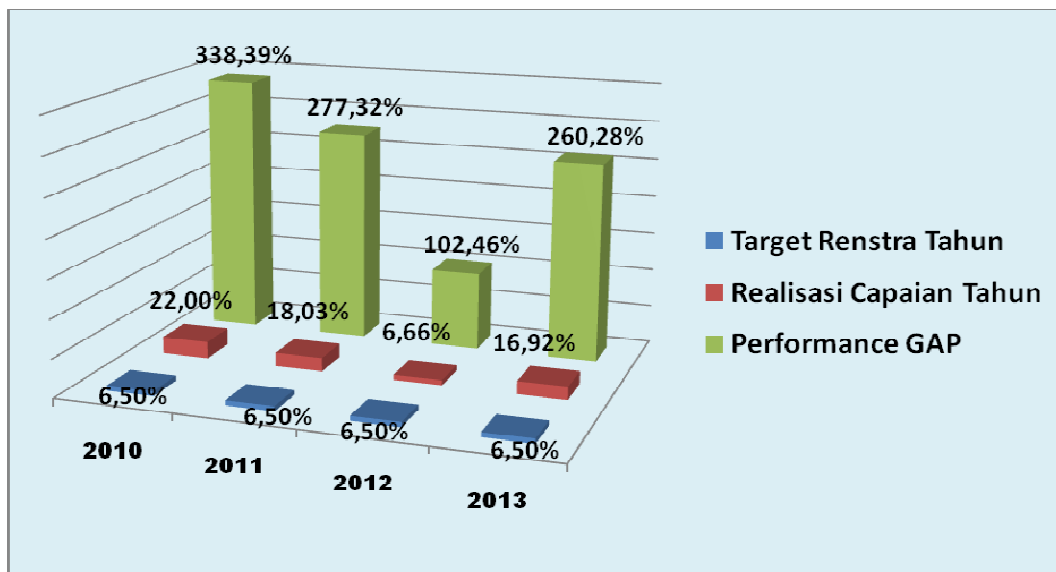
1. **Sasaran Strategis Pertama “ Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”** yang terdiri terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu : **Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Persentase Penurunan Piutang/Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).**

Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (antara Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013) menunjukkan trend peningkatan yang positif dimana terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dengan tingkat kenaikan sebesar 22% pada Tahun 2010 dan pada

Tahun 2011 menjadi sebesar 18,03%, kemudian naik lagi pada Tahun 2012 menjadi sebesar 6,66%, dan pada Tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 16,92%. Hal ini dapat terlihat pada Grafik 3.1.

Grafik 3.1

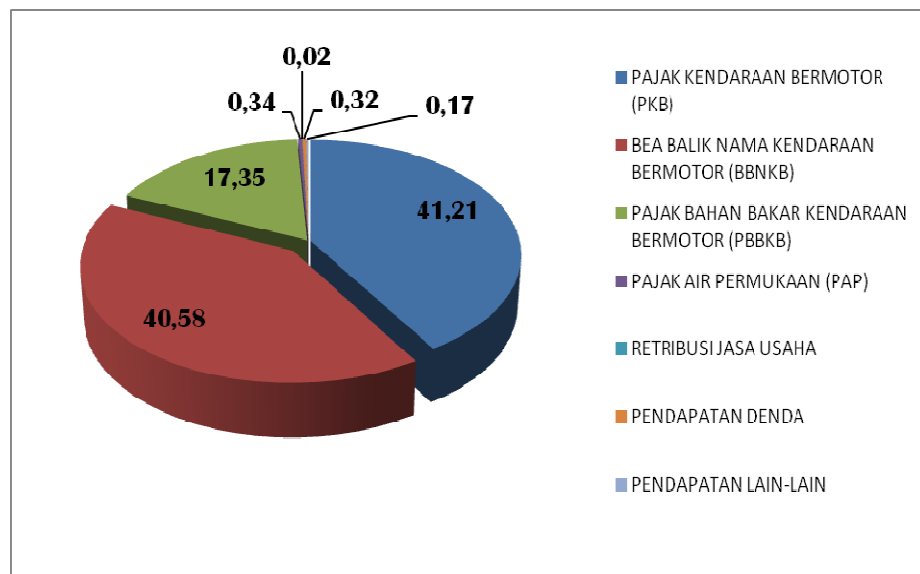
Perbandingan Persentase Target Rencana Strategis dan Realisasi Capaian Kinerja serta Rasio Capaian Kinerja (*Performance Gap*) Tahun 2010-2013 untuk Indikator Kinerja Utama : Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur ini didukung dari beberapa sektor antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 41,21%, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 40,58%, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 17,35%, Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar 0,34%, Retibusi Jasa Usaha sebesar 0,02%, Pendapatan Denda sebesar 0,32%, dan Pendapatan Lain-Lain sebesar 0,17%. Secara detail dapat dilihat pada Grafik 3.2 sebagai berikut.

Grafik 3.2

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dari Beberapa Sektor



Pencapaian Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ini dilakukan dengan beberapa upaya yang dilakukan pada KB. Samsat di Jawa Timur yang terdiri dari 48 (empat puluh delapan) Kantor Bersama Samsat, selain itu juga Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur berupaya mengembangkan layanan-layanan Samsat Unggulan seperti :

a. Samsat *Drive Thru* sebanyak 25 Lokasi;

Layanan Samsat *Drive Thru* ini telah tersebar di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, antara lain :

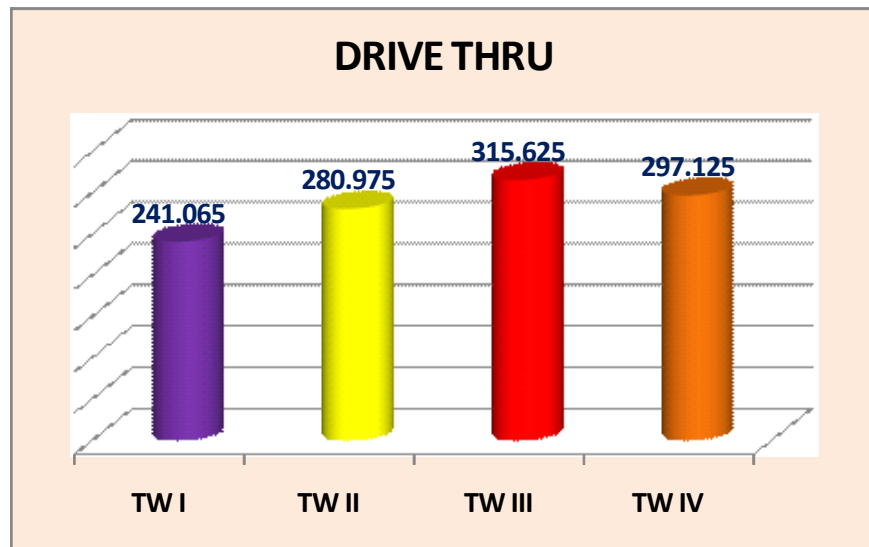
- 1) Surabaya Barat (GIANT Rajawali)
- 2) Surabaya Timur (Samsat Manyar)
- 3) Surabaya Selatan (A. Yani)
- 4) Gresik (Dishub)
- 5) Sidoarjo (Induk)
- 6) Sidoarjo (Alun-Alun)

- 7) Sidoarjo (Krian)
- 8) Mojokerto (Induk)
- 9) Jombang (Induk)
- 10) Kediri Katang
- 11) Kediri Kota
- 12) Blitar Kota
- 13) Blitar Wlingi
- 14) Malang Kota (Samsat)
- 15) Malang Selatan (Talangagung)
- 16) Pasuruan (Bangil)
- 17) Jember Barat
- 18) Banyuwangi (Induk)
- 19) Lamongan (Veteran)
- 20) Madiun Kota
- 21) Madiun Kabupaten
- 22) Malang Utara & Batu (Batu)
- 23) Probolinggo (Kraksaan)
- 24) Trenggalek (Stadiun)
- 25) Pacitan (Alun-Alun)

Pelayanan Samsat *Drive Thru* selama Tahun 2013, telah dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dengan rincian perolehan Triwulan I sebanyak 241.065 Obyek, Triwulan II sebanyak 280.975 Obyek, Triwulan III sebanyak 315.625 Obyek dan Triwulan IV sebanyak 297.125 Obyek, secara singkat dapat terlihat pada grafik 3.3 berikut.

Grafik 3.3

Pemanfaatan Samsat Drive Thru oleh Wajib Pajak



- b. Samsat *Payment Point* sebanyak 58 Lokasi;

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur memiliki 58 (lima puluh delapan) Samsat *Payment Point* yang tersebar hampir di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, yaitu antara lain :

- 1) Surabaya Utara Taman Budaya
- 2) Surabaya Utara UPT
- 3) Surabaya Selatan
- 4) Gresik UPT
- 5) Gresik Bank Jatim Driyorejo
- 6) Sidoarjo Taman
- 7) Sidoarjo Puspa Agro
- 8) Mojokerto (Mojosari)
- 9) Mojokerto UPT
- 10) Jombang UPT
- 11) Kediri Papar
- 12) Kediri Grogol

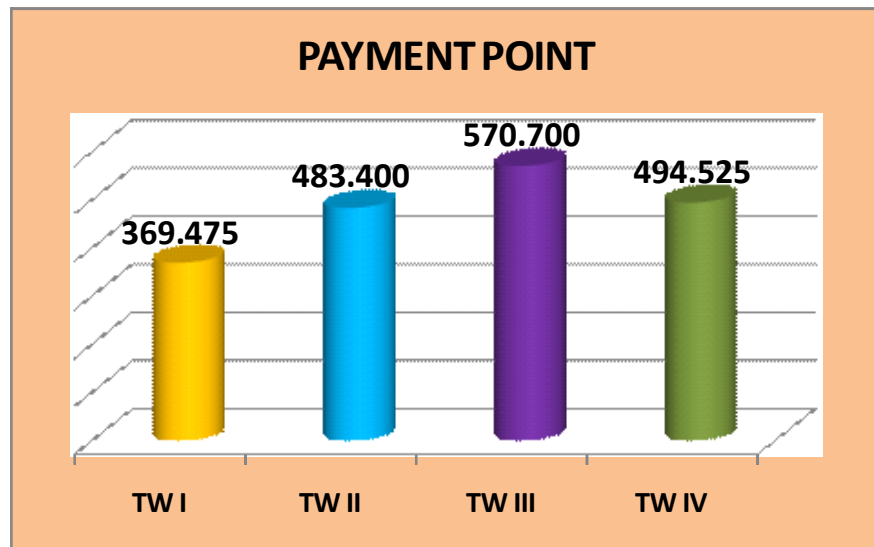
- 13) Kediri Ngadiluwih
- 14) Blitar Srengat
- 15) Blitar Kanigoro
- 16) Tulungagung Ngunut
- 17) Tulungagung Campur Darat
- 18) Malang Kota Alun-Alun
- 19) Malang Selatan Dampit
- 20) Pasuruan Bank Jatim Pandaan
- 21) Jember Tanggul
- 22) Jember Bank Jatim Pandaan
- 23) Banyuwangi
- 24) Banyuwangi Glenmore
- 25) Bojonegoro Padangan
- 26) Bojonegoro Kedung Adem
- 27) Lamongan Babat
- 28) Lamongan Brondong
- 29) Tuban Jatirogo
- 30) Tuban Rengkel
- 31) Tuban Kerek
- 32) Madiun Balerejo
- 33) Madiun Dolopo
- 34) Ngawi Karang Jati
- 35) Ngawi Jatirogo
- 36) Magetan Karang Rejo
- 37) Magetan Bank Jatim
- 38) Magetan UPT
- 39) Ponorogo Balong
- 40) Ponorogo Sumoroto

- 41) Ponorogo Juanda Ex Samsat
- 42) Nganjuk Waru Jayeng
- 43) Nganjuk Kertosono
- 44) Malang Utara & Batu Tumpang
- 45) Probolinggo Tongas
- 46) Probolinggo Leces
- 47) Lumajang Pasirian
- 48) Lumajang Yosowilangun
- 49) Trenggalek Gandusari
- 50) Trenggalek Suruh
- 51) Situbondo
- 52) Situbondo Payment Point
- 53) Pamekasan Waru
- 54) Bangkalan Blega
- 55) Bangkalan Tanjung Bumi
- 56) Sumenep Pragaan
- 57) Pacitan Lorok
- 58) Pacitan Punung

Hasil Pemanfaatan Samsat *Payment Point* di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 pada Triwulan I sebanyak 369.475, Triwulan II sebanyak 483.400, Triwulan III sebanyak 570.700 dan Triwulan IV sebanyak 494.525 seperti terlihat pada Grafik 3.4 berikut.

Grafik 3.4

Pemanfaatan Samsat *Payment Point* oleh Wajib Pajak



c. Samsat *Corner* sebanyak 8 Counter;

Samsat *Corner* saat ini terdapat pada beberapa lokasi di Jawa Timur, antara lain :

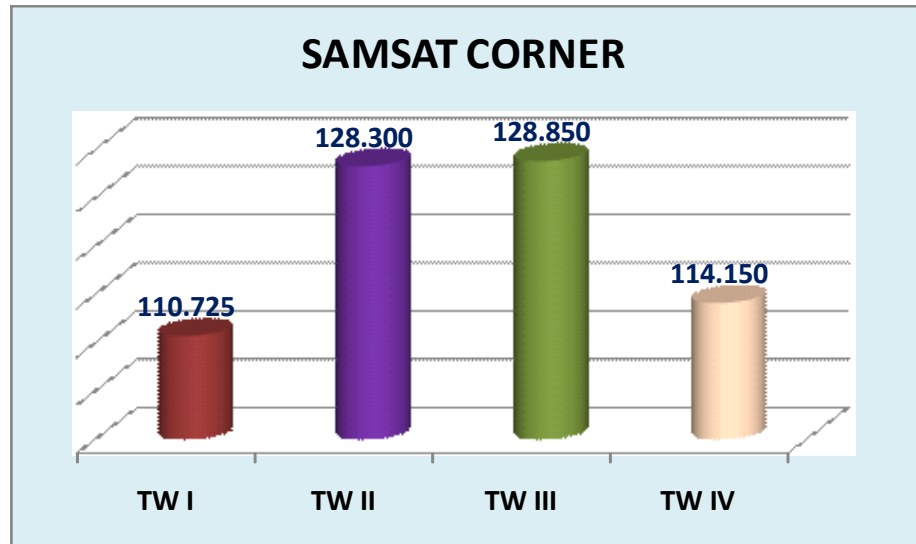
- 1) Surabaya Barat (PTC)
- 2) Surabaya Timur (Carrefour Rungkut)
- 3) Surabaya Timur (Galaxy Mall)
- 4) Surabaya Utara (ITC)
- 5) Surabaya Selatan (Royal Plaza)
- 6) Sidoarjo (Giant Pondok Tjandra)
- 7) Kediri (Sri Ratu Mall)
- 8) Malang Kota (MOG)

Hasil Evaluasi pemanfaatan Samsat *Corner* oleh Wajib Pajak Tahun 2013 pada Triwulan I jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pada Samsat *Corner* sebanyak 110.725 Obyek, Triwulan II sebanyak 128.300 Obyek, Triwulan III sebanyak 128.850 Obyek dan

Triwulan IV sebanyak 114.150 Obyek secara rinci dapat dilihat dari gambaran Grafik 3.5 berikut.

Grafik 3.5

Pemanfaatan Samsat Corner oleh Wajib Pajak Tahun 2013



- d. Samsat Keliling Mandiri sebanyak 38 Unit Mobil Keliling dan 1 Unit Bus Samsat Keliling;

Saat ini Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur memiliki 1 (satu) Unit Bus Samsat Keliling yang berada pada Kantor Dinas dan 38 Unit Mobil Keliling yang tersebar pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, berikut ini adalah UPT yang memiliki layanan mobil keliling antara lain :

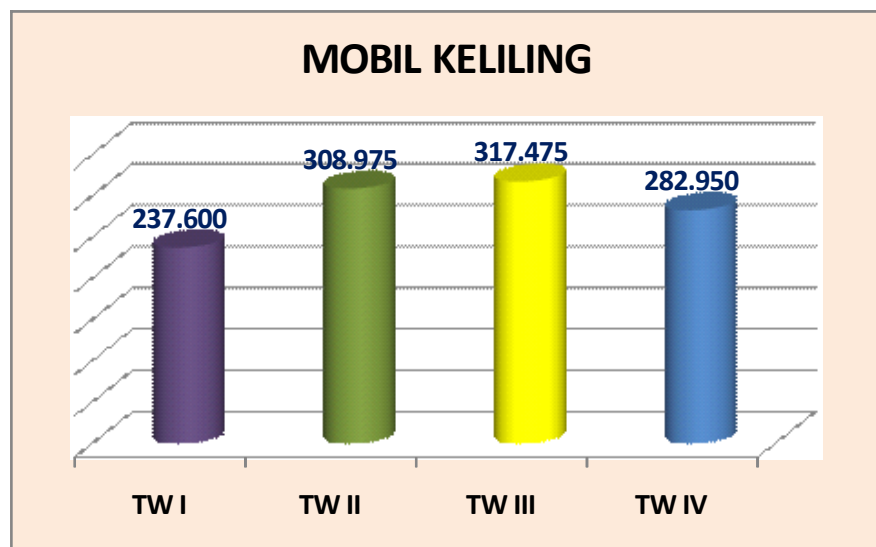
- 1) Surabaya Barat
- 2) Surabaya Timur
- 3) Surabaya Utara
- 4) Surabaya Selatan
- 5) Gresik
- 6) Sidoarjo
- 7) Mojokerto

- 8) Jombang
- 9) Kediri Pare/Katang
- 10) Kediri Kota
- 11) Blitar
- 12) Tulungagung
- 13) Malang Kota
- 14) Malang Selatan
- 15) Pasuruan
- 16) Jember Barat
- 17) Jember Timur
- 18) Banyuwangi
- 19) Bojonegoro
- 20) Lamongan
- 21) Tuban
- 22) Madiun Kota
- 23) Madiun Kabupaten
- 24) Ngawi
- 25) Magetan
- 26) Ponorogo
- 27) Nganjuk
- 28) Malang Karang Ploso
- 29) Probolinggo
- 30) Lumajang
- 31) Trenggalek
- 32) Bondowoso
- 33) Situbondo
- 34) Pamekasan
- 35) Bangkalan

- 36) Sumenep
- 37) Pacitan
- 38) Sampang

Pemanfaatan Samsat Mobil Keliling oleh Wajib Pajak pada Tahun 2013 secara umum pada Triwulan I sebanyak 237.600 Obyek, Triwulan II sebanyak 308.975 Obyek, Triwulan III sebanyak 317.475 dan Triwulan IV sebanyak 282.950 Obyek. Hal ini terlihat pada Grafik 3.6 berikut ini.

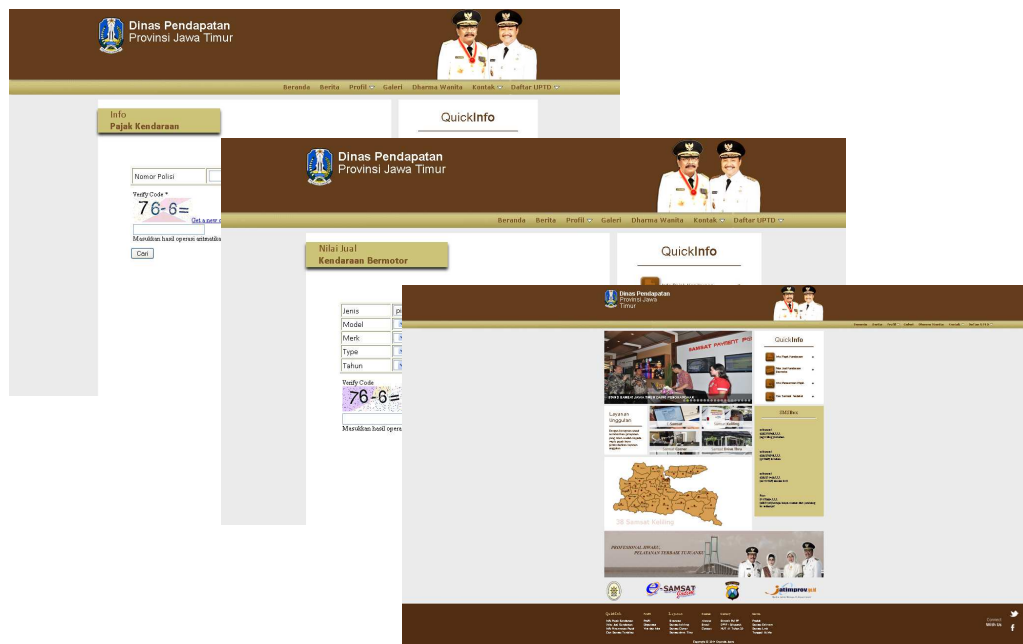
Grafik 3.6
Pemanfaatan Samsat Mobil Keliling oleh Wajib Pajak
Tahun 2013



- e. Samsat *Link* Layanan ini telah mencapai 177 Titik Wilayah;
- f. Kartu EDC Bekerja sama dengan Bank Mandiri khusus di wilayah Koordinator Surabaya;

Selain itu juga Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur telah mengembangkan inovasi layanan berbasis Teknologi Informasi antara lain :

- Homepage yaitu : <http://www.dipendajatim.go.id>
Layanan melalui website, masyarakat bisa mendapatkan informasi terbaru di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur ataupun informasi lain yang berkaitan dengan prosedur pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor, *link* ke berbagai industri otomotif yang ada, info Nilai Jual Kendaraan Bermotor berbagai *type* dan tahun pembuatan;
Bentuk Tampilan Website Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :



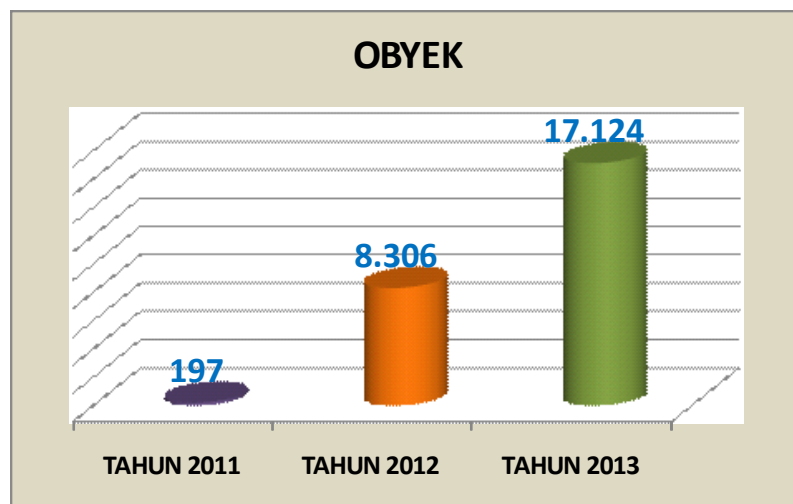
- e-Samsat Jatim atau e-Banking merupakan pelayanan 24 Jam secara online di Jawa Timur yang saat ini telah bekerja sama dengan Bank Jatim, Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI;
e-Samsat pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dimulai pada bulan Oktober 2011 dengan disepakatinya kerjasama antara Dinas Pendapatan Provinsi Jawa

Timur dengan Bank Mandiri, sampai dengan akhir Tahun 2011, layanan e-Samsat telah dimanfaatkan Wajib Pajak sebanyak 197 Obyek dengan Potensi sebesar Rp 163.549.000.

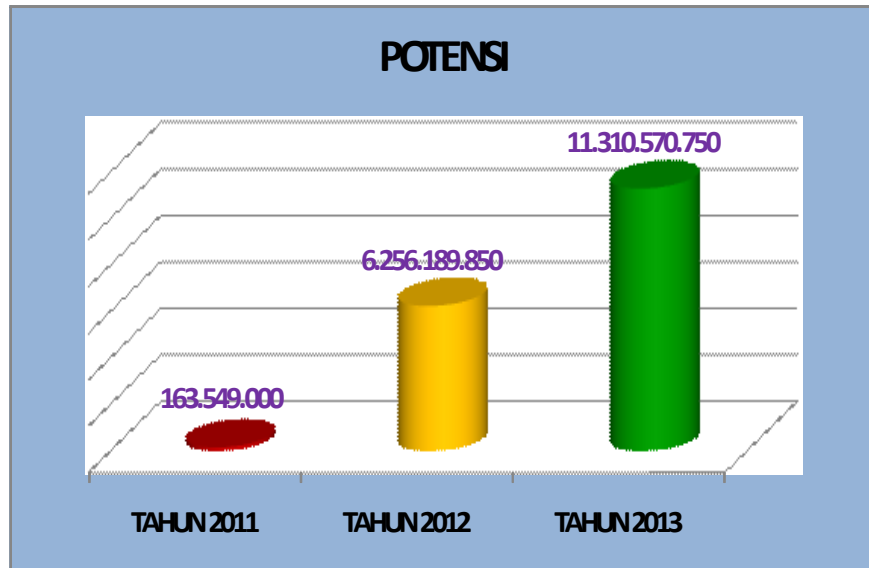
Pada Tahun 2012 layanan e-Samsat telah dikembangkan dengan pelaksanaan MoU antara Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dengan Bank BNI, Bank BRI dan Bank Jatim. Sampai dengan akhir tahun 2012 e-Samsat telah dikenal dan dimanfaatkan oleh Wajib Pajak di Provinsi Jawa Timur, hal ini dapat dilihat sampai dengan akhir tahun 2012 Wajib Pajak yang memanfaatkan transaksi dengan e-Samsat mencapai 8.306 Obyek dengan potensi sebesar Rp 6.256.189.850 dan pada akhir tahun 2013 pemanfaatan e-Samsat di Provinsi Jawa Timur sebanyak 17.124 Obyek dengan potensi sebesar Rp 11.310.570.750. Perkembangan transaksi melalui e-Samsat ini secara detail dapat dilihat pada grafik 3.7 (Obyek) dan 3.8 (Potensi) berikut.

Grafik 3.7

**Pemanfaatan e-Samsat oleh Wajib Pajak
Tahun 2011 s.d. Tahun 2013 (Obyek)**

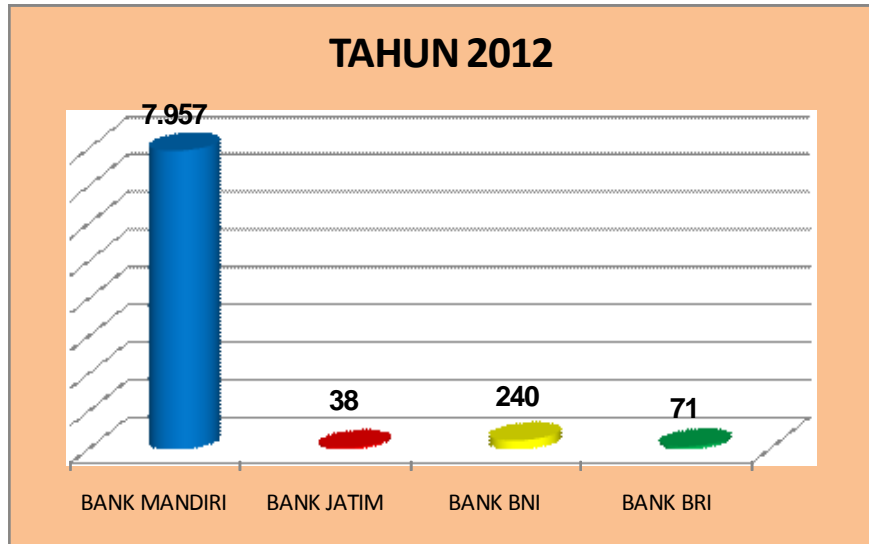


Grafik 3.8
Pemanfaatan e-Samsat oleh Wajib Pajak
Tahun 2011 s.d. Tahun 2013 (Potensi)

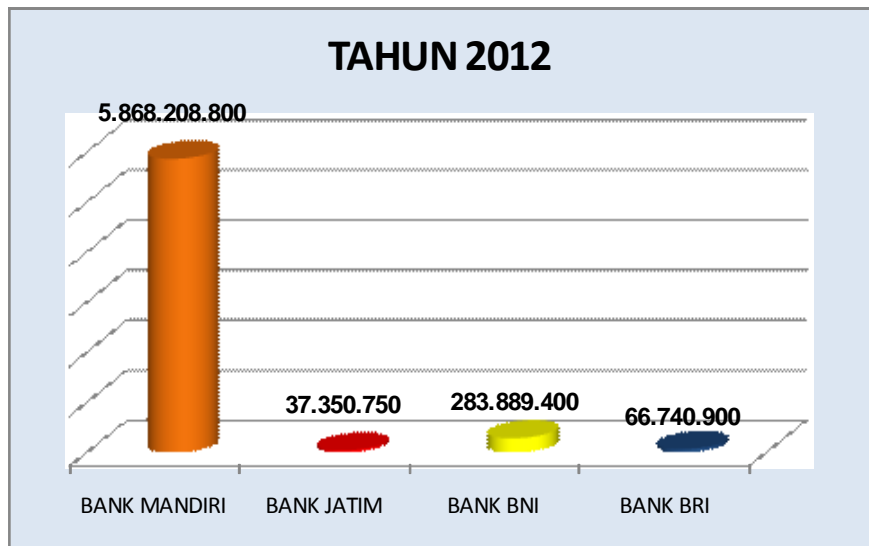


Kerjasama e-Samsat Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dengan Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BNI dan Bank Jatim. Dari tahun 2012 sampai dengan 2013 Wajib Pajak di Jawa Timur secara mayoritas lebih memilih menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Mandiri, hal ini dapat dilihat dari grafik 3.9 (Obyek Tahun 2012), 3.10 (Potensi Tahun 2012), 3.11 (Obyek Tahun 2012) dan 3.12 (Potensi Tahun 2013).

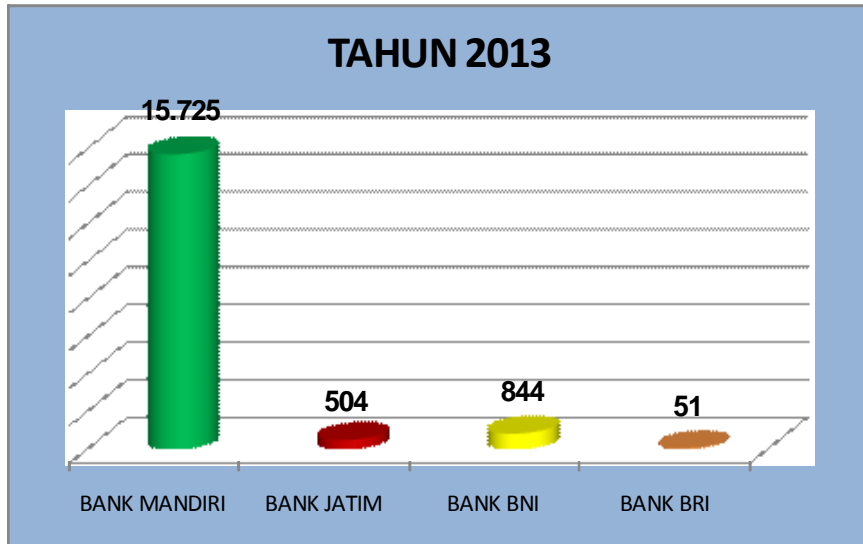
Grafik 3.9
Pemanfaatan e-Samsat oleh Wajib Pajak berdasarkan Bank
Tahun 2012 (Obyek)



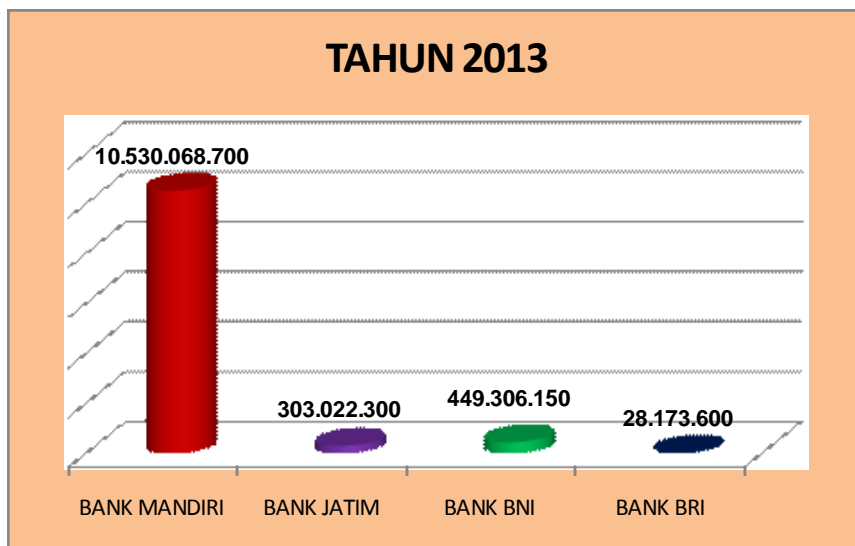
Grafik 3.10
Pemanfaatan e-Samsat oleh Wajib Pajak berdasarkan Bank
Tahun 2012 (Potensi)



Grafik 3.11
Pemanfaatan e-Samsat oleh Wajib Pajak berdasarkan Bank
Tahun 2013 (Obyek)



Grafik 3.12
Pemanfaatan e-Samsat oleh Wajib Pajak berdasarkan Bank
Tahun 2013 (Potensi)



- SMS Info PKB
Layanan informasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melalui SMS;
- SMS Komplain
Menampung keluhan Wajib Pajak melalui SMS tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan dan atau pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur terus melakukan inovasi-inovasi layanan kepada masyarakat dengan mengembangkan Sistem Layanan Samsat Drive Thru yang pada awalnya hanya untuk Kendaraan Roda-4 (empat) saat ini Kendaraan Roda-2 (dua) juga dapat menggunakan fasilitas Samsat Drive Thru dimaksud. Dan pada Unit Pelaksana Teknis juga mendukung dengan melakukan kegiatan Sosialisasi melalui Media Cetak maupun Media Elektronik baik terkait dengan Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah.

Pada sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) peningkatan dilakukan dengan membentuk Tim Intensifikasi PBBKB untuk melakukan perhitungan secara tepat dan menunjuk pelaksana Wajib Pungut melalui koordinasi pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan pihak terkait dan mendorong kelancaran kegiatan pemungutan PBBKB dimaksud.

Pada Tahun 2011 Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur menunjuk 9 (Sembilan) Perusahaan yang memiliki kewajiban sebagai Wajib Pungut, yaitu antara lain :

NO	PENYEDIA BAHAN BAKAR	JUMLAH
1	PT. Pertamina UPMS V Surabaya	1.173.450.627.982
2	PT. AKR Corporindo, Tbk	23.180.766.993
3	PT. Patra Niaga	10.618.382.722
4	PT. Shell Indonesia	7.535.041.024
5	PT. Petrobas Indonesia	-
6	PT. Citra Nusantara Energi	306.361.477
7	PT. Petro Andalan Nusantara	1.164.305.783
8	PT. Tri Wahana Universal	134.067.348
9	PT. Petronas Niaga	839.310.966
Jumlah		1.217.228.864.294

Pada Tahun 2012 Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur menunjuk 14 (empat belas) perusahaan yang menjadi Wajib Pungut, antara lain :

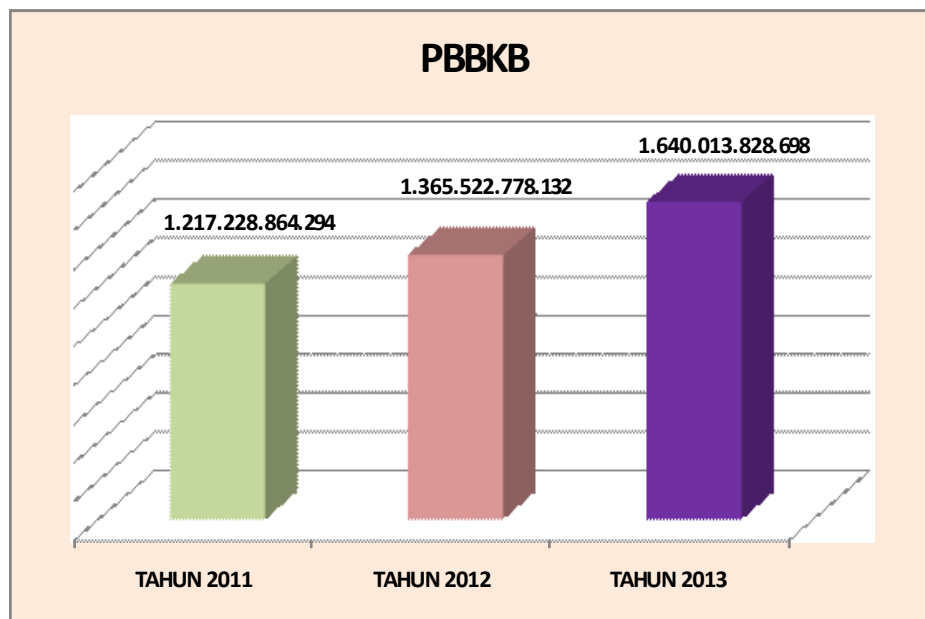
NO	PENYEDIA BAHAN BAKAR	JUMLAH
1	PT. Pertamina UPMS V Surabaya	1.317.339.390.397
2	PT. Petronas Niaga Indonesia	615.448.317
3	PT. Citra Nusantara Energi	10.468.967
4	PT. AKR Corporindo, Tbk	27.121.403.507
5	PT. Patra Niaga	6.120.858.567
6	PT. Shell Indonesia	8.351.617.357
7	PT. Petro Andalan Nusantara	4.096.723.386
8	PT. Tri Wahana Universal	1.767.489.733
9	PT. Hanlyn Jaya Mandiri	21.248.500
10	PT. Delta Artha Bahari Nusantara	68.583.229
11	PT. Petrobas	-
12	PT. Samudra Etam Energy	5.060.172
13	PT. Ocean Pacific	4.486.000
14	PT. Universal Protection	-
Jumlah		1.365.522.778.132

Sedangkan pada Tahun 2013 Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur menunjuk 12 (dua belas) Wajib Pungut dengan rincian sebagai berikut :

NO	PENYEDIA BAHAN BAKAR	JUMLAH
1	PT. Pertamina UPMS V Surabaya	1.590.504.292.388
2	PT. Petronas Niaga Indonesia	39.328.072
3	PT. Citra Nusantara Energi	58.572.168
4	PT. AKR Corporindo, Tbk	28.607.677.013
5	PT. Patra Niaga	6.106.033.612
6	PT. Shell Indonesia	9.429.288.043
7	PT. Petro Andalan Nusantara	4.696.948.897
8	PT. Tri Wahana Universal	323.343.316
9	PT. Delta Artha Bahari Nusantara	21.635.860
10	PT. Samudra Etam Energy	102.376.324
11	PT. Ocean Petro Energy	52.696.681
12	PT. Primergy Solution	71.636.324
Jumlah		1.640.013.828.698

Sektor PBBKB juga memiliki kontribusi yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor ini dari Tahun 2011 sampai dengan 2013 terjadi peningkatan, yaitu pada Tahun 2011 terealisasi sebesar Rp 1.217.228.864.294, pada Tahun 2012 realisasi mencapai Rp 1.365.522.778.132 dan pada Tahun 2013 realisasi dari sektor PBBKB ini telah mencapai sebesar Rp 1.640.013.828.698. Dapat dijabarkan seperti yang terlihat pada grafik 3.13 berikut.

Tabel 3.13
Pendapatan Sektor PBBKB



Selain Sektor PBBKB Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur juga memiliki kegiatan peningkatan Penerimaan PAD dari sektor Pajak Air Permukaan (PAP) dengan melakukan kerja sama dengan Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur untuk menentukan besaran tarif yang dikenakan pada pribadi atau Badan Usaha, selain itu juga saat ini telah diupayakan untuk dilakukan pemasangan alat ukur (meteran) untuk mengukur pemakaian air secara tepat bukan hanya dilihat dari besaran penampang pipa dan estimasi semata.

Pendapatan sektor Retribusi Daerah juga merupakan salah satu bagian yang tidak lepas dalam memberikan kontribusi dari Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, dan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor Retribusi Daerah khususnya Retribusi Jasa Usaha telah dilakukan melalui

penggalan sektor Retribusi Tempat Pelelangan (RTP), dalam rangka pemungutan maupun penggalan potensi Retribusi serta membangun kerjasama dalam pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui koordinasi dengan PT. Perkebunan atau Badan Usaha Milik Negara terkait dengan Retribusi Daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur serta melalui perawatan ruangan yang ada pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) maupun KB. Samsat yang telah dipersiapkan untuk menarik masyarakat menggunakan fasilitas tersebut selain itu juga saat ini dilakukan pembangunan sarana dan prasarana serta ruang-ruang baru yang diperuntukan untuk usaha pribadi maupun Badan Usaha, serta melakukan kerja sama dengan Bank-Bank Pemerintah untuk memfasilitasi lahan kosong guna dijadikan bangunan mesin ATM.

Dari hasil pemungutan Retribusi Jasa Usaha yang dilakukan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur terdapat 33 (tiga puluh tiga) UPT yang memiliki pungutan dari sektor Retribusi Jasa Usaha, antara lain :

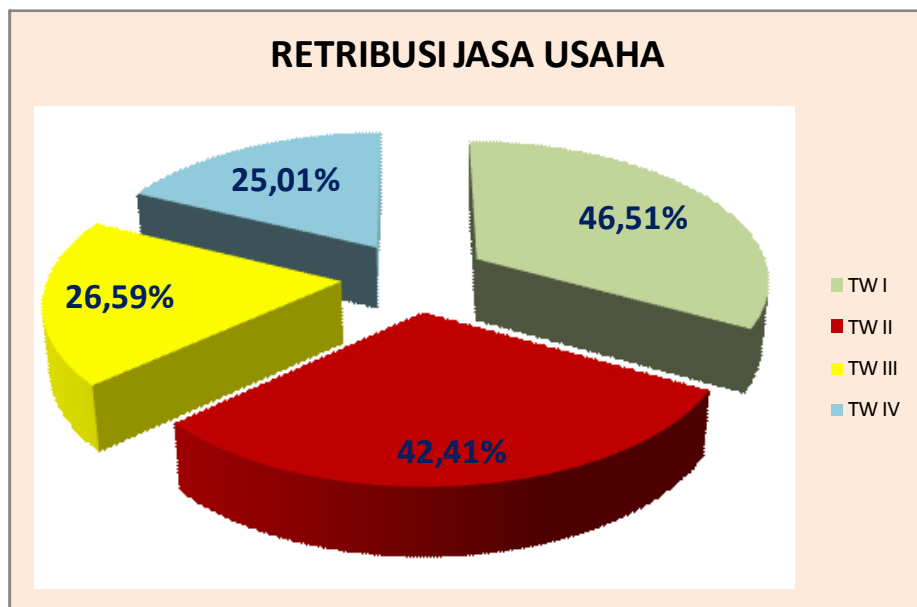
- a. Surabaya Timur
- b. Surabaya Selatan
- c. Surabaya Barat
- d. Surabaya Utara
- e. Mojokerto
- f. Sidoarjo
- g. Gresik
- h. Jombang
- i. Bojonegoro
- j. Tuban

- k. Lamongan
- l. Ngawi
- m. Madiun
- n. Magetan
- o. Ponorogo
- p. Pacitan
- q. Kediri
- r. Tulungagung
- s. Trenggalek
- t. Nganjuk
- u. Malang Kota
- v. Malang Selatan
- w. Malang Utara & Batu
- x. Blitar
- y. Probolinggo
- z. Lumajang
- aa. Pasuruan
- bb. Situbondo
- cc. Jember
- dd. Bondowoso
- ee. Banyuwangi
- ff. Pamekasan
- gg. Bangkalan
- hh. Sampang
- ii. Sumenep

Pemungutan dari sektor Retribusi Jasa Usaha pada Tahun 2013 terlihat dari target yang telah ditetapkan pada Triwulan I telah terealisasi sebesar 46,51%, Triwulan II sebesar 42,41%, Triwulan III sebesar 26,59% dan Triwulan IV sebesar 25,01%. Terlihat pada Grafik 3.14 berikut ini.

Grafik 3.14

Penerimaan Sektor Retribusi Jasa Usaha Per-Triwulan
Tahun Anggaran 2013



Selain hal tersebut, Retribusi Parkir Berlangganan juga merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah dari Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur. Untuk peningkatan penerimaan dari sektor ini, maka saat ini dilakukan koordinasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat khususnya Dinas Perhubungan.

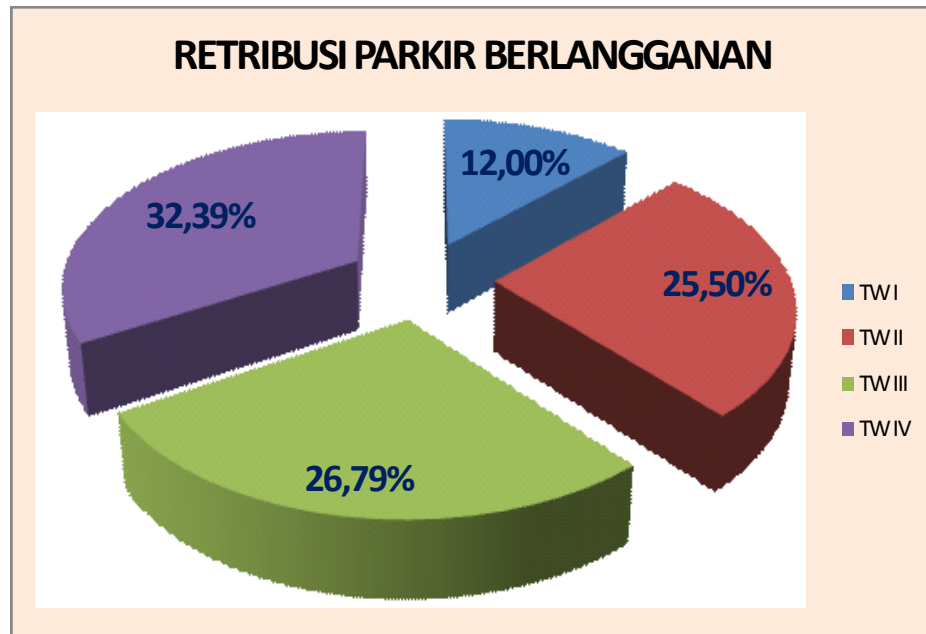
Hasil koordinasi yang dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota bersambut positif, sehingga pada Tahun 2013 ini UPT yang telah memiliki Retribusi Parkir Berlangganan sebanyak 22 (dua puluh dua) UPT antara lain :

- a. Mojokerto
- b. Sidoarjo
- c. Jombang
- d. Bojonegoro

- e. Lamongan
- f. Ngawi
- g. Madiun
- h. Pacitan
- i. Kediri
- j. Tulungagung
- k. Trenggalek
- l. Nganjuk
- m. Blitar
- n. Probolinggo
- o. Lumajang
- p. Pasuruan
- q. Situbondo
- r. Jember
- s. Bondowoso
- t. Banyuwangi
- u. Pamekasan
- v. Sumenep

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Kontribusi Parkir Berlangganan pada Tahun 2013 per-Triwulan (TW I s.d. TW IV) secara umum dan berurutan adalah sebagai berikut Triwulan I sebesar 12,00%, Triwulan II sebesar 25,50%, Triwulan III sebesar 26,79% dan Triwulan IV sebesar 32,39%. Dapat terlihat pada grafik 3.15 berikut.

Grafik 15
Penerimaan Sektor Retribusi Parkir Berlangganan Per-Triwulan Tahun
2013



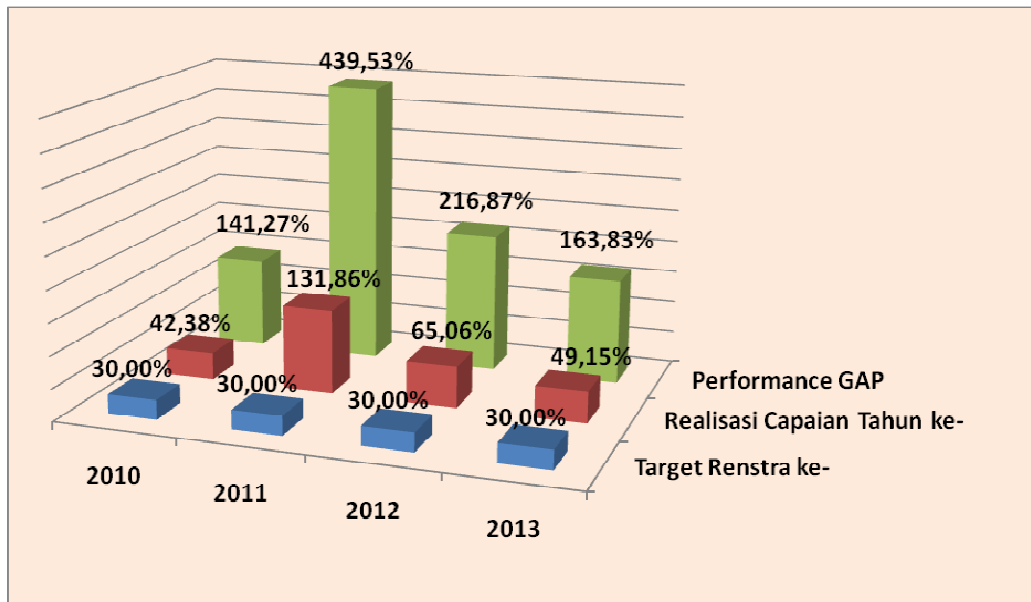
Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur juga melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian dari sisi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali yang mana setiap 3 (tiga) bulan telah diberikan target AKP Penerimaan, sehingga diharapkan target per-triwulan dapat tercapai dan sampai dengan akhir Tahun Anggaran seluruh target yang dibebankan dan menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dapat terealisasikan.

Sedangkan Persentase Penurunan Piutang/Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari saldo Piutang/Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) awal tahun (*base line* tahun 2009) selama kurun waktu 4

(empat) tahun juga menunjukkan jumlah yang cukup signifikan yaitu pada Tahun 2010 tercapai penurunan Piutang/Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 42,38%, pada Tahun 2011 sebesar 131,86%, pada Tahun 2012 sebesar 65,06% dan pada Tahun 2013 menjadi sebesar 49,15%. Hal ini dapat dilihat pada Grafik 3.16.

Grafik 3.16

Perbandingan Persentase Target Rencana Strategis dan Realisasi Capaian Kinerja serta Rasio Capaian Kinerja Tahun 2010-2013 untuk Indikator Kinerja Utama : Persentase Penurunan Piutang/Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Jenis Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok serta Retribusi Jasa Usaha serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dimana sudah tidak

dimungkinkan lagi untuk menambah jenis pajak baru (*closed list*), pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah mendefinisikan bahwa terjadinya tunggakan adalah jika suatu Obyek Wajib Pajak sampai dengan H+1 tidak melakukan pembayaran atas kewajibannya melunasi Pajak Terhutang dan diterbitkannya SKPD, serta dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dijelaskan bahwa Tunggakan terjadi dikarenakan Wajib Pajak yang tidak melakukan pendaftaran ulang dan pembayaran pada saat jatuh tempo diterbitkan SKPD pada hari berikutnya, dimana setelah SKPD diterbitkan, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan STPD, setelah 14 (empat belas) hari diterbitkan STPD pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar, diterbitkan Surat Peringatan Pertama (SP. I), dan setelah 21 (dua puluh satu) hari diterbitkan SP. I pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar, diterbitkan Surat Peringatan Kedua (SP. II).

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka tugas yang cukup berat bagi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur untuk dapat mencairkan Tunggakan atau Piutang Pajak yang ada, maka terhadap Tunggakan atau Piutang Pajak yang menjadi kewenangan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur telah dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna melakukan kebijakan-kebijakan efisiensi dan keadilan.

Pelaksanaan kebijakan efisiensi yang dilaksanakan antara lain :

1. Memberikan kemudahan persyaratan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor untuk pengesahan STNK tanpa melampirkan BPKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor,
2. Mendekatkan Layanan kepada Wajib Pajak melalui pengembangan Samsat Keliling, Samsat Payment Point, Samsat Kepulauan, Samsat Pembantu dan e-Samsat dengan mengembangkan penggunaan layanan berbasis Teknologi Informasi.

Pelaksanaan nilai keadilan yang dilaksanakan antara lain :

1. Memberitahukan kepada Wajib Pajak terkait kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor 14 hari sebelum masa pajaknya berakhir;
2. Melakukan Pengenaan Pajak Progresif terhadap kendaraan bermotor roda 4 (empat) jenis penumpang milik pribadi kepemilikan kedua dan seterusnya dan roda 2 (dua) dengan isi silinder lebih dari 250 cc;
3. Menerapkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor 50% dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan roda 2 (dua) yang usianya di atas 25 (dua puluh lima tahun) tahun;

4. Memberikan Pengurangan Pajak terhadap Kendaraan Angkutan Penumpang Umum sebesar 40% dan Kendaraan Angkutan Barang Umum sebesar 20% yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur untuk waktu yang telah ditentukan;
5. Memberikan Insentif Pajak berupa keringanan, pembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Selain melakukan kebijakan-kebijakan efisiensi dan keadilan, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur mengerahkan seluruh Sumber Daya Manusia yang ada untuk melakukan penagihan dari rumah ke rumah dengan pemberian beban Per-orangan sesuai dengan potensi tunggakan pada masing-masing daerah unit kerja, menunjuk dan mengangkat Juru Sita untuk melakukan penagihan dengan Surat Paksa sampai dengan Penyitaan, Berkerja sama dengan Polri dalam pelaksanaan Operasi Bersama untuk menjaring Wajib Pajak yang belum melaksanakan Pendaftaran Ulang dan Penelitian Ulang, serta terkait keseluruhan kegiatan tersebut Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur juga melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dimaksud setiap 3 (tiga) bulan sekali.

TUJUAN 1	SASARAN 1
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator Kinerja, Target dan Realisasi serta Rasio Capaian Kinerja (*Performance Gap*) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dari Tujuan pertama yaitu Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Sasaran Strategis pertama yaitu : Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini dapat disajikan dalam Tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Indikator Kinerja, Target dan Realisasi (Sasaran Strategis : Peningkatan PAD)

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
1	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6,5%	16,92%	260,28%
2	Persentase Penurunan Piutang/Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	30%	49,15%	163,83%
Rata-Rata Persentase Capaian Kinerja (Sasaran Strategis)				212,10%

Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran Strategis 1 (Pertama) pada Tabel 3.4. dapat dijelaskan bahwa Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dibandingkan target pada tahun sebelumnya dengan estimasi peningkatan target sebesar 6,5% dapat terealisasi sebesar 16,92% sehingga pada indikator kinerja ini rasio capaian kinerjanya adalah sebesar 212,10%.

Sedangkan pada Indikator Kinerja Persentase Penurunan Piutang/Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari target sebesar 30% dapat terealisasi sebesar

49,15%, sehingga terjadi rasio capaian kinerjanya adalah sebesar 163,83%.

Hal tersebut dapat terlihat dari realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2013 sebesar Rp 9.464.416.237.214,37 (atau sebesar 16,92%) dari realisasi PAD pada Tahun 2012 sebesar Rp 7.863.227.376.446,00 dan persentase Penurunan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2013 sebesar 49,15% dari besaran tunggakan Tahun 2013 dan melampaui dari Target Rencana Strategis (Renstra) Tahun Berjalan sebesar 30% per tahun.

2. Sasaran Strategis Kedua yaitu : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang terdiri dari 2 (dua) Indikator yaitu Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Jumlah KB. Samsat yang Melaksanakan SMM ISO 9001:2008.

Paradigma baru pelayanan publik adalah menempatkan masyarakat sebagai pengguna jasa dan pemerintah daerah pada posisi yang sederajat. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan perannya sebagai abdi masyarakat (civil servant), sudah seharusnya mengemban tugas untuk memantau dan memperhatikan kepuasan dan pendapat masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Prinsip ini sejalan dengan esensi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (otonomi) dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hal-hal sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya terkait prosedur pelayanan, transparansi biaya, informasi kemudahan persyaratan pembayaran, konsistensi waktu pelayanan dan biaya, sarana dan prasarana yang memadai, suasana lingkungan yang nyaman dan aman, serta kepastian hukum.

Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik (*public service*) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya (Kepmnen PAN no. 25 tahun 2004).

Menurut Kepmen PAN No. 25 tahun 2004, ada beberapa dimensi yang menjelaskan kinerja pegawai pelayanan publik. Dari peraturan tersebut, ada 14 hal yang berkaitan dengan kepuasan masyarakat dari pelayanan yang dilakukan oleh pegawai/petugas pelayanan, yaitu:

- a. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
- b. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang dibutuhkan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
- c. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
- d. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
- f. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
- g. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;

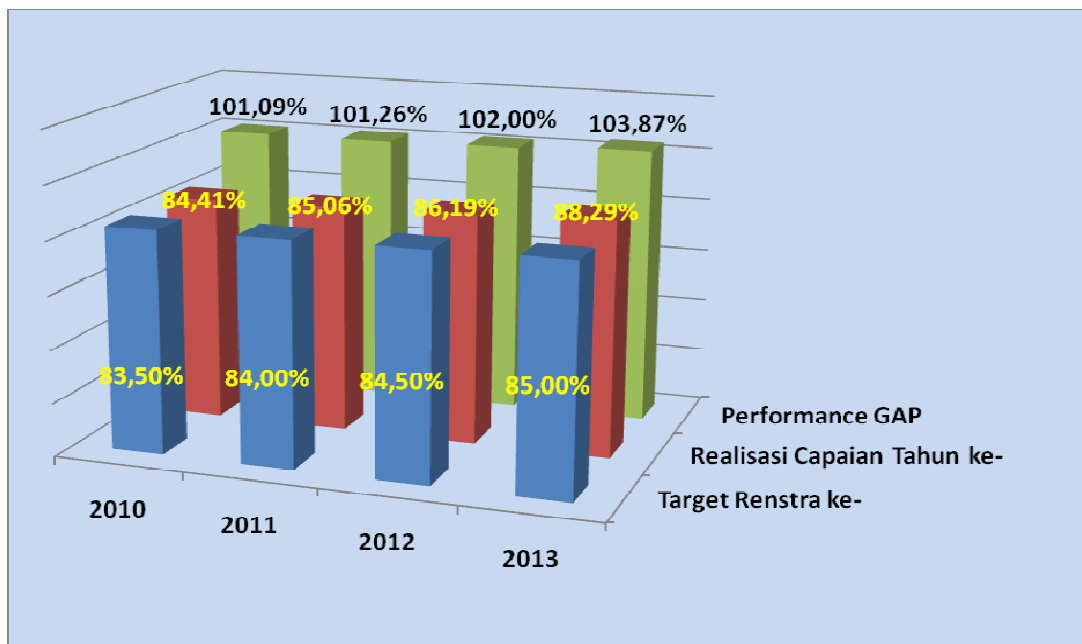
- h. Keadilan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
- i. Kesopanan petugas pelayanan, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
- j. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
- k. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
- l. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- m. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
- n. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap risiko-risiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Hal ini dapat dilihat pada Grafik 3.17 dimana selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (tahun 2010-2013) menunjukkan peningkatan Nilai Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM), yaitu pada Tahun 2010 sebesar 84,41 menjadi 85,06 pada Tahun 2011, pada Tahun 2012 naik menjadi sebesar 86,19 dan pada Tahun 2013 naik menjadi sebesar 88,29.

Grafik 3.17

Perbandingan Persentase Target Rencana Strategis dan Realisasi Capaian Kinerja serta Rasio Capaian Kinerja (*Performance Gap*) Tahun 2010-2013 untuk Indikator Kinerja Utama : Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)



Pencapaian Sasaran Strategis Kedua yaitu Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Indikator Kinerja Peningkatan Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan dengan beberapa upaya antara lain :

- a. Pengembangan atau peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan, dengan pemanfaatan teknologi informasi (*hardware* dan *software*) sebagai pendukung utama kelembagaan;

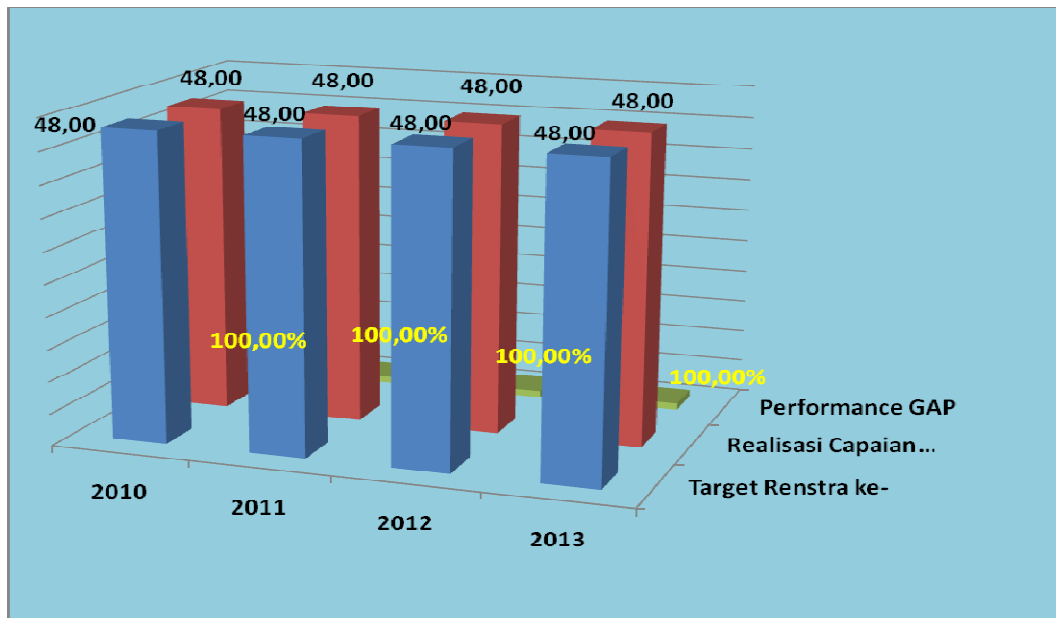
- c. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur di Bidang Etika Pelayanan;
- a. Melibatkan masyarakat terhadap pengisian Kuesioner terkait unsur pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak, sehingga diharapkan dapat memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan harapan Wajib Pajak;
 - a. Pemasangan e-IKM (IKM Elektronik), tujuan dari pemasangan e-IKM adalah untuk memperoleh informasi secara langsung dari Wajib Pajak terhadap pelayanan yang diberikan pada saat itu serta dari pemanfaatan informasi dari e-IKM pihak pemberi pelayanan dapat secara langsung menghubungi/menanyakan secara langsung kepada Wajib Pajak apa yang kurang dari pelayanan yang telah diberikan dan secara cepat dan tepat mengambil tindakan perbaikan;
 - a. Melakukan Evaluasi terhadap hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang masih rendah dan mencari solusi pemecahan secara tepat sehingga unsur IKM yang masih rendah dapat ditingkatkan serta melakukan monitoring dan Pengawasan Melekat terhadap pelaksanaan tindakan perbaikan dimaksud.

TUJUAN 2	SASARAN 2
Terwujudnya pelayanan publik yang baik, dengan azas Transparansi, Akuntabilitas, Kondisional, Partisipatif, Keseimbangan Kesamaan Hak dan Kewajiban	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Jumlah Kantor Bersama (KB) Samsat yang berstandar atau telah melaksanakan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 dari target awal 48 (empat puluh delapan) KB Samsat. pada tahun 2010 rasio capaian kinerjanya (*performance gap*) sebesar 100%, kemudian pada tahun 2011 rasio capaian kinerja dapat dipertahankan sebesar 100%, dan pada tahun 2012 rasio capaian kinerjanya juga sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 48 (empat puluh delapan) Kantor Bersama (KB) Samsat di Jawa Timur yang dapat mempertahankan sertifikasi SMM ISO 9001:2008, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2013 rasio capaian kinerjanya juga sebesar 100%. Hal ini terlihat dari Grafik 3.18.

Grafik 3.18

Perbandingan Persentase Target Rencana Strategis dan Realisasi Capaian Kinerja serta Rasio Capaian Kinerja (*Performance Gap*) Tahun 2010-2013 untuk Indikator Kinerja Utama : Jumlah KB. Samsat yang Melaksanakan SMM ISO 9001:2008



Pencapaian Sasaran Strategis Kedua yaitu Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada konsistensi pelaksanaan pelayanan publik berstandar Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 ini diwujudkan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan utama antara lain :

- Memberikan pelayanan terhadap masyarakat (Wajib Pajak) disesuaikan dengan Sistem dan Prosedur Pelayanan;
- Transparansi pelayanan baik dalam hal persyaratan maupun biaya;
- Menjaga kebersihan dan tata ruang kantor pelayanan (KB. Samsat) dan penyusunan berkas pada ruang Arsip;
- Memberikan informasi terkait alur pelayanan dan durasi waktu pelayanan pada Papan Pengumuman;

- e. Pelayanan pada KB. Samsat se-Jawa Timur sudah berstandar Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 dan pelaksanaan audit eksternal sebagai uji kelayakan kelanjutan sertifikasi.

Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 pada Unit Pelayanan di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, selain dievaluasi secara internal juga dievaluasi secara eksternal oleh dua lembaga yang bergerak dalam bidang pemeriksaan, pengawasan, pengujian dan pengkajian yaitu **PT Superintending Company Of Indonesia (Persero) SUCOFINDO** dan **PT TUV NORD Indonesia**.

PT SUCOFINDO melakukan evaluasi eksternal terhadap 25 (dua puluh lima) Kantor Bersama Samsat antara lain :

- a. KB. Samsat Jombang
- b. KB. Samsat Bojonegoro
- c. KB. Samsat Lamongan
- d. KB. Samsat Madiun Kabupaten
- e. KB. Samsat Madiun Kota
- f. KB. Samsat Ponorogo
- g. KB. Samsat Kediri Kota
- h. KB. Samsat Tulungagung
- i. KB. Samsat Malang Selatan
- j. KB. Samsat Malang Utara & Batu (Batu)
- k. KB. Samsat Blitar Kabupaten
- l. KB. Samsat Probolinggo Kota
- m. KB. Samsat Probolinggo Kraksaan
- n. KB. Samsat Magetan
- o. KB. Samsat Lumajang
- p. KB. Samsat Pasuruan Kota
- q. KB. Samsat Pasuruan Bangil

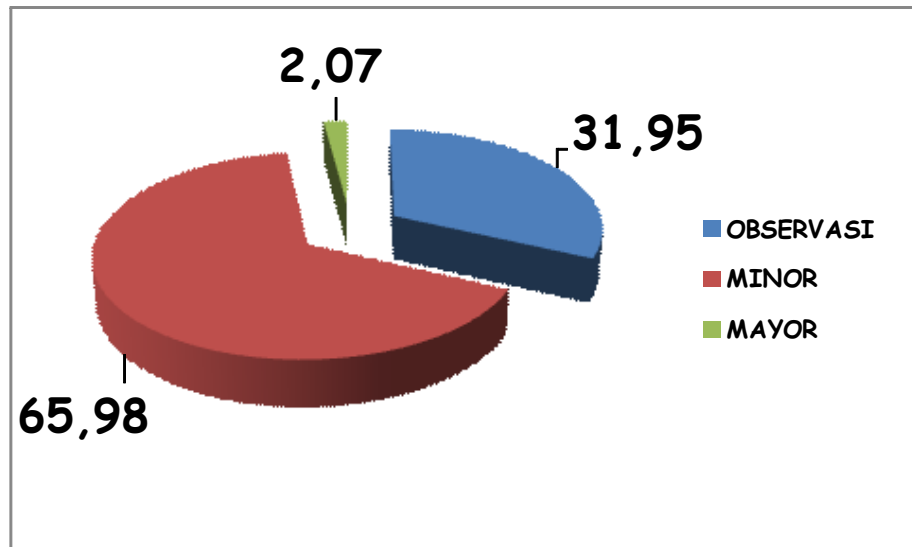
- r. KB. Samsat Situbondo
- s. KB. Samsat Jember Soebandi
- t. KB. Samsat Bondowoso
- u. KB. Samsat Banyuwangi
- v. KB. Samsat Banyuwangi Benculuk
- w. KB. Samsat Pamekasan
- x. KB. Samsat Sumenep
- y. KB. Samsat Kangean

Sedangkan PT TUV NORD Indonesia melakukan evaluasi eksternal terhadap 23 (dua puluh tiga) Kantor Bersama Samsat, dengan rincian sebagai berikut :

- a. KB. Samsat Surabaya Timur
- b. KB. Samsat Surabaya Selatan
- c. KB. Samsat Surabaya Barat
- d. KB. Samsat Surabaya Utara
- e. KB. Samsat Mojokerto
- f. KB. Samsat Sidoarjo Kota
- g. KB. Samsat Sidoarjo Krian
- h. KB. Samsat Gresik
- i. KB. Samsat Gresik Bawean
- j. KB. Samsat Tuban
- k. KB. Samsat Ngawi Kota
- l. KB. Samsat Ngawi Widodaren
- m. KB. Samsat Pacitan
- n. KB. Samsat Kab. Pare
- o. KB. Samsat Kab. Katang
- p. KB. Samsat Nganjuk
- q. KB. Samsat Trenggalek
- r. KB. Samsat Malang Kota
- s. KB. Samsat Malang Utara & Batu (Kr. Ploso)
- t. KB. Samsat Blitar Kota
- u. KB. Samsat Jember Teratai
- v. KB. Samsat Sampang
- w. KB. Samsat Bangkalan

Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut pada Tahun 2013, secara keseluruhan dapat dilihat pada Grafik 3.19 berikut

Grafik 3.19
Temuan Hasil Evaluasi PT SUCOFINDO dan PT TUV NORD Indonesia
pada seluruh KB. Samsat di Jawa Timur
Tahun Anggaran 2013



Terhadap seluruh temuan yang ada telah ditindaklanjuti oleh Tim Manajemen ISO yang dibentuk pada masing-masing KB. Samsat, sehingga sertifikat ISO 9001:2008 masih dimiliki oleh seluruh KB. Samsat di Jawa Timur.

Indikator Kinerja, Target dan Realisasi serta Rasio Capaian Kinerja dari Tujuan ke-dua (yaitu Terwujudnya pelayanan publik yang baik, dengan azas Transparansi, Akuntabilitas, Kondisional, Partisipatif, Keseimbangan Kesamaan Hak dan Kewajiban) dengan Sasaran Strategis ke-dua yaitu : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ini dapat disajikan dalam Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Indikator Kinerja, Target dan Realisasi serta Rasio Capaian Kinerja
(Sasaran Strategis : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Nilai IKM (pada pelayanan KB Samsat)	85,00	87,56	103,01%
2	Jumlah KB Samsat yang melaksanakan SMM ISO 9001:2008	48	48	100,00%
Rata-Rata Persentase Capaian Kinerja (Sasaran Strategis)				101,50%

Hasil Pengukuran Sasaran Strategis Kedua yaitu Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (pada Tabel 3.5), dapat dijelaskan bahwa pencapaian Kinerja dalam hal pemenuhan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan KB. Samsat yang diukur berdasarkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yaitu dengan target awal 85,00 terealisasi menjadi sebesar 87,56 dan pada pengukuran jumlah Kantor Bersama (KB) Samsat yang berstandar SMM ISO 9001:2008 dari target awal 48 KB Samsat, maka pada Tahun 2013 sebanyak 48 (empat puluh delapan) Kantor Bersama (KB) Samsat di Jawa Timur yang dapat mempertahankan sertifikasi SMM ISO 9001:2008, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2013 Capaian Kinerja untuk Sasaran Strategis : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik berpredikat **Sangat Baik** (rata-rata sebesar 101,50%) berdasarkan Tabel 3.5. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran Nilai Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) menunjukkan suatu kenaikan dan konsistensi KB Samsat di Jawa Timur yang berstandar atau bersertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008, bahkan telah melampaui target.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

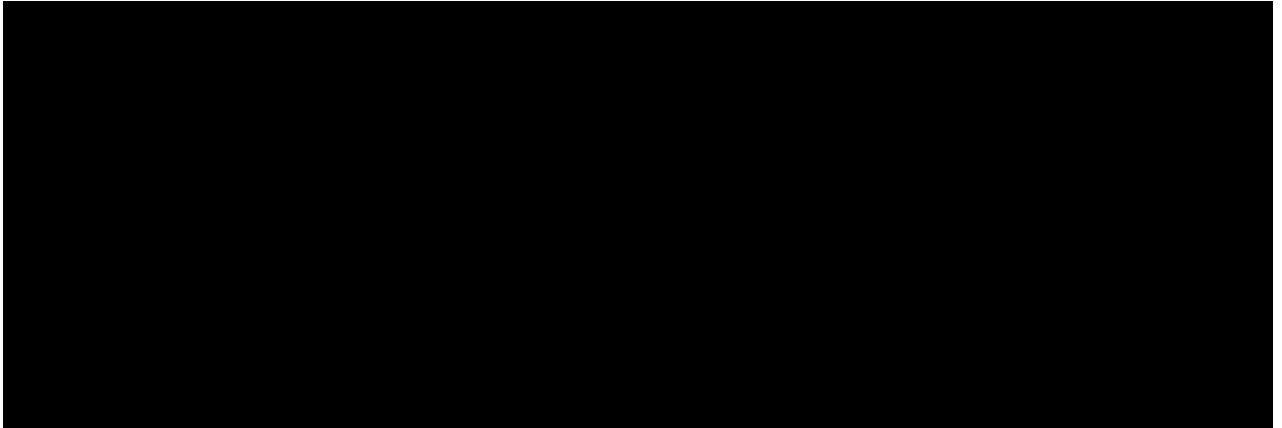
Akuntabilitas Keuangan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 diarahkan pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terwujudnya Pelayanan Publik yang Baik, Terpercaya dan Transparan di Bidang Pendapatan Daerah, terhadap pemenuhan tersebut maka Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur mempunyai dasar Program dan Kegiatan Utama yang mendukung tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.3.1 Ikhtisar Pencapaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur bersumber dari **Pajak Daerah** (yang terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP)), dan **Retribusi Jasa Usaha (RJU)** (yang terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (RPKD) dan Retribusi Tempat Pelelangan (RTP)) serta **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah**. Secara garis besar Laporan nilai Realisasi Penerimaan Kas masing-masing Jenis Pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

tersebut (dalam Tahun Anggaran 2013) dapat dijelaskan pada Tabel 3.6 sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Pendapatan Asli Daerah (yang dipungut oleh Dinas Pendapatan
Provinsi Jawa Timur) Tahun Anggaran 2013



Total realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sampai dengan bulan Desember Tahun 2013 sebesar Rp 9.454.356.806.113 atau sebesar 109,71% dari target sebesar Rp 8.617.350.000.000.

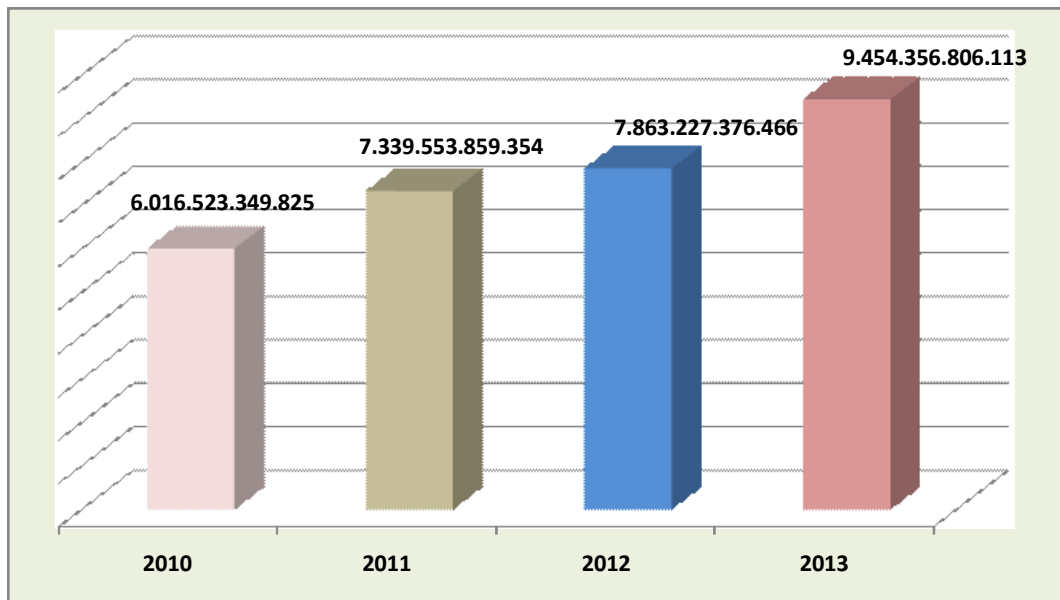
Pada lampiran AK.18 dapat diketahui sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang paling dominan adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai bagian dari Pajak Daerah. Untuk penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sampai dengan bulan Desember Tahun 2013 sebesar Rp 3.896.189.871.560,00 atau sebesar 108,41% dari target tahun berjalan sebesar Rp 3.594.000.000.000,00.

Berikut adalah grafik pertumbuhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur mulai dari Tahun 2010

sampai dengan Tahun 2013 (sementara Tahun Anggaran 2013 belum di-audit).

Grafik 3.20

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2013 (Tahun 2013 belum di-audit)



3.3.2 Ikhtisar Realisasi Target Kinerja Belanja Langsung

Di dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Indikator Hasil, Satuan dan Sasaran yang akan dicapai sesuai dengan Program dan Kegiatan yang telah disusun di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2013. Dengan demikian diharapkan segala program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan terarah sesuai target yang ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan target yang diharapkan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan anggaran Belanja Langsung dan mendapatkan alokasi dana (setelah perubahan) pada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah sebesar Rp 256.801.612.000,00 (dua ratus lima puluh enam milyar delapan ratus satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah). Secara lengkap dituangkan dalam Tabel 3.7 berikut

Tabel 3.7

Realisasi Belanja Langsung Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 (* belum di Audit)

NO	Program/Kegiatan	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp) *	Rasio Capaian (%)
A.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	51.764.034.925,00	42.208.277.058,00	81,54
1	<i>Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah</i>	4.174.890.400,00	3.508.089.350,00	84,03
2	<i>Peningkatan Pendapatan Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah</i>	10.795.400.000,00	8.080.527.965,00	74,85
3	<i>Peningkatan Kinerja Operasional</i>	1.495.840.000,00	889.049.200,00	59,43
4	<i>Kerjasama Pengembangan Pendapatan Daerah dengan Kab/Kota dan Pemerintah Pusat Terkait</i>	1.734.260.000,00	1.382.380.468,00	79,71
5	<i>Kerjasama dengan Sektor Publik/BUMN dan Pengembangan Sharing Pendapatan (Profit/Revenue Sharing) dan Manajemen Pelayanan Publik (Benchmarking)</i>	143.817.500,00	114.164.565,00	79,38
6	<i>Retribusi Tempat Lelang Kayu Hasil Hutan</i>	632.520.000,00	577.332.300,00	91,27
7	<i>Peningkatan Pengembangan Kelembagaan</i>	2.169.770.000,00	1.767.149.450,00	81,44
8	<i>Peningkatan Pelayanan Publik</i>	7.749.343.000,00	6.986.730.144,00	90,16
9	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan</i>	394.453.025,00	284.848.025,00	72,21
10	<i>Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Daerah</i>	572.920.000,00	509.665.600,00	88,96
11	<i>Pengembangan Pusat Pengolahan Data</i>	3.724.984.000,00	3.336.549.400,00	89,57

12	<i>Analisis dan Evaluasi Kinerja</i>	4.146.550.000,00	2.647.391.830,00	63,85
13	<i>Pengembangan dan Perbaikan Sarana/Prasarana Kelembagaan</i>	7.258.387.000,00	6.254.916.900,00	86,18
14	<i>Fasilitas Intensifikasi Pendapatan Daerah</i>	1.809.810.000,00	1.722.149.950,00	95,16
15	<i>Pengelolaan Data Pendapatan Daerah</i>	2.004.480.000,00	1.583.485.420,00	79,00
16	<i>Peningkatan Kompetensi Pranata Komputer KB. Samsat dan UPTD</i>	439.725.000,00	365.792.525,00	83,19
17	<i>Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi di KB. Samsat dan UPTD</i>	2.516.885.000,00	2.198.053.966,00	87,33

NO	Program/Kegiatan	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp) *	Rasio Capaian (%)
B.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	132.869.533.990,00	125.587.727.105,00	94,52
1	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	35.314.780.000,00	33.391.074.596,00	94,55
2	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	12.528.000.000,00	12.258.240.327,00	97,85
3	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional</i>	171.600.000,00	170.879.800,00	99,58
4	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	7.713.740.000,00	6.850.751.347,00	88,81
5	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	7.991.017.640,00	7.669.212.238,00	95,97
6	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	4.509.048.990,00	4.267.375.460,00	94,64
7	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	15.347.347.860,00	15.220.716.180,00	99,17
8	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor</i>	710.274.500,00	651.132.524,00	91,67
9	<i>Penyediaan peralatan rumah tangga</i>	92.250.000,00	78.484.600,00	85,08
10	<i>Penyediaan bahan bacaan dan undangan</i>	809.950.000,00	709.666.810,00	87,62
11	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	2.053.000.000,00	1.706.347.500,00	83,11
12	<i>Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	2.178.000.000,00	1.906.130.876,00	87,52
13	<i>Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah</i>	12.551.025.000,00	11.409.449.769,00	90,90
14	<i>Penyediaan jasa lembur</i>	26.130.200.000,00	25.048.892.000,00	95,86
15	<i>Penyediaan Jasa Kantor</i>	4.769.300.000,00	4.249.373.078,00	89,10
C.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	42.407.111.085,00	37.601.222.988,00	88,67
1	<i>Pengadaan kendaran dinas/operasional</i>	4.116.300.000,00	3.764.272.500,00	91,45
2	<i>Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor</i>	18.061.756.085,00	16.621.660.040,00	92,03

3	<i>Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional</i>	4.835.925.000,00	3.977.105.384,00	82,24
4	<i>Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga</i>	8.192.275.000,00	7.210.437.080,00	88,02
5	<i>Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Air, Telepon dan Listrik</i>	1.324.875.000,00	1.071.175.880,00	80,85
6	<i>Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Besar Pembantu</i>	1.427.690.000,00	1.292.597.744,00	90,54
7	<i>Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga</i>	4.448.290.000,00	3.663.974.360,00	82,37
D.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	2.087.550.000,00	1.967.449.500,00	94,25
1	<i>Pengadaan pakaian kerja lapangan</i>	2.087.550.000,00	1.967.449.500,00	94,25
E.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	27.423.382.000,00	25.205.332.865,00	91,91
1	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>	718.260.000,00	527.276.500,00	73,41
2	<i>Sosialisasi peraturan perundang – undangan</i>	9.888.750.000,00	8.765.198.290,00	88,64
3	<i>Penyediaan Jasa Tenaga Outsourcing</i>	11.309.480.000,00	11.299.830.000,00	99,91
4	<i>Rapat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	2.407.620.000,00	2.210.138.000,00	91,80
NO	Program/Kegiatan	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp) *	Rasio Capaian (%)
5	<i>Peningkatan Kompetensi Bidang Aparatur</i>	3.099.272.000,00	2.402.890.075,00	77,53
F.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	250.000.000,00	180.000.000,00	72,00
1.	<i>Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur</i>	250.000.000,00	180.000.000,00	72,00

Untuk program prioritas/utama Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari alokasi anggaran (setelah perubahan) sebesar Rp 51.764.034.925,00, realisasi penyerapannya sebesar Rp 42.208.277.058,00 atau persentase realisasi penyerapan anggarannya sebesar 81,54%. Dari persentase rasio capaian penyerapan anggaran pada ke-6 (enam) secara keseluruhan yaitu : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah, maka rata-rata persentase realisasi penyerapan anggarannya adalah sebesar 87,14%. Dan dari alokasi anggaran belanja langsung (setelah perubahan) sebesar Rp 256.801.612.000,00 (dua ratus lima puluh enam milyar delapan ratus satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah), realisasi penyerapan akhir Belanja Langsung Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 232.750.009.516.00 (dua ratus tiga puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah) atau persentase realisasi penyerapan anggarannya sebesar 90,63%.

BAB IV

P E N U T U P

4.1. KESIMPULAN

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2013 Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur telah mampu mencapai Target Kinerja, baik yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 maupun di dalam Penetapan Kinerja Tahun 2013. Hal ini dapat dilihat yaitu antara lain :

1. Pada **Indikator Kinerja Persentase Kenaikan Penerimaan PAD** dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya untuk Realisasi Tahun 2013 jika dibandingkan dengan Tahun 2012 terjadi kenaikan sebesar 16,92% dan telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 6,5% sehingga Rasio Capaian Kinerjanya (*Performance Gap*) sebesar 260,28%;
2. Pada **Indikator Kinerja Persentase Penurunan Piutang/Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)** terhadap saldo awal Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2013 telah dilakukan pencairan tunggakan dengan Realisasi penurunan tunggakan mencapai angka 49,15% dan telah melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun berjalan yaitu sebesar 30% sehingga Rasio Capaian Kinerjanya (*Performance Gap*) sebesar 163,83%;
3. Pada **Indikator Kinerja Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** untuk Realisasi menunjukkan angka sebesar 88,29 dan telah melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun

berjalan yaitu sebesar 85,00 sehingga Rasio Capaian Kinerjanya (*Performance Gap*) sebesar 103,87%;

4. Pada **Indikator Kinerja Jumlah KB. Samsat Jawa Timur yang Melaksanakan/Berstandar SMM ISO 9001:2008** juga telah menunjukkan konsistensi mengingat dari target 48 (empat puluh delapan) KB Samsat yang bersertifikasi ISO 9001:2008 pada Tahun 2013 sebanyak 48 (empat puluh delapan) KB. Samsat pula yang berhak melanjutkan sertifikasi ISO 9001:2008. Dengan demikian Rasio Capaian Kinerjanya atau (*Performance Gap*)-nya sebesar 100,00%.

4.2. PERMASALAHAN DAN KENDALA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi baik dalam peningkatan capaian Kinerja Pendapatan maupun Kinerja Pelayanan. Pencapaian Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan trend perkembangan yang baik, namun terdapat beberapa kelemahan dirasakan menjadi ancaman (*threats*) bagi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di masa yang akan datang yaitu :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang semakin berkurang baik jumlah (kuantitas) maupun kompetensi (kualitas);
2. Belum optimalnya distribusi atau penempatan petugas (Sumber Daya Manusia Aparatur) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;
3. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

4.3. REKOMENDASI

Dalam upaya peningkatan capaian kinerja yang berkelanjutan, maka diperlukan adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar berbagai pihak di dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur. Namun demikian, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur tetap harus selalu meningkatkan capaian kinerjanya (*Performance Gap*) seiring dengan ekspektasi/harapan masyarakat Wajib Pajak terhadap pelayanan yang selalu berkembang, sehingga diperlukan inovasi-inovasi dan langkah-langkah kebijakan yang tepat dalam proses pelayanan. Dan berikut adalah hal-hal yang perlu mendapatkan prioritas ke depan antara lain :

1. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur akan senantiasa meningkatkan kapabilitas (kemampuan) Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, khususnya dalam hal kualitas pelayanan publik;
2. Melaksanakan perbaikan sistem jaringan guna mendukung pengembangan Teknologi Informasi dalam pengelolaan keuangan dan perbaikan kualitas pelayanan serta pengembangan sarana dan prasarana pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan Pihak lain;
3. Melaksanakan inovasi-inovasi, baik dalam hal penagihan Pajak Daerah maupun pelayanan kepada Wajib Pajak dengan melihat kondisi dan kultur masyarakat Wajib Pajak, serta memperhatikan keterbatasan Sumber Daya Manusia Aparatur yang ada;
4. Meningkatkan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas serta kerjasama (*Networking*) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka upaya dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

5. Pengembangan Kebijakan di bidang Pendapatan Daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 disusun sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi kinerja mendatang.